

LAPORAN TAHUNAN YAYASAN KURAWAL 2024

**MENEGAKKAN
PANJI TOPI
JERAMI:
ARAH BARU
GERAKAN
MASYARAKAT
SIPIL INDONESIA**

{ KURAWAL
FOUNDATION }

include | protect | engage



“

Tidak cukup bertahan,
saatnya bergerak
bersama membangun
kekuatan.

Tentang Sampul:

Peserta aksi mengibarkan bendera Jolly Roger ala One Piece saat demonstrasi di dekat Gedung DPR, 25 Agustus 2025. Mereka menolak kenaikan tunjangan anggota DPR.

Foto: Agoes Rudianto.

DAFTAR ISI

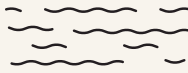


{04}



KATA PENGANTAR

Untuk Kita yang
Memilih Bertopi Jerami

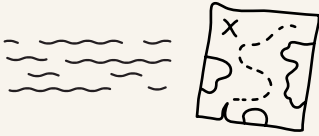


{07}



PROLOG

Indonesia Tidak
Seindah Dunia Dora



{11}



BANGKITNYA PARA BAJAK LAUT BUDIMAN

- 2.1. Titik Balik Pemilu 2024: Memperkarakan *Tahta Kosong*
- 2.2. Suara dari Akar Rumput – Menentukan Arah Menuju *Grand Line*

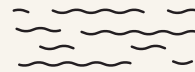


{26}



TEGAKNYA PANJI TOPI JERAMI

- 3.1. Rancang-Aksi: Menemukan "Log Pose" untuk Gerakan
- 3.2. Persekutuan dengan Media Lokal – Semua Pelayaran Butuh Nico Robin

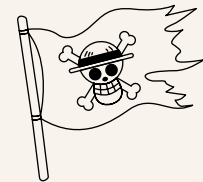
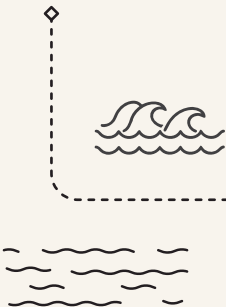


{39}



EPILOG

Kibarkan Bendera,
Jelajah Samudera!



{44}



CATATAN

LAMPIRAN

{47}



TENTANG
KURAWAL

{48}



CATATAN TENTANG
TOKOH ONE PIECE

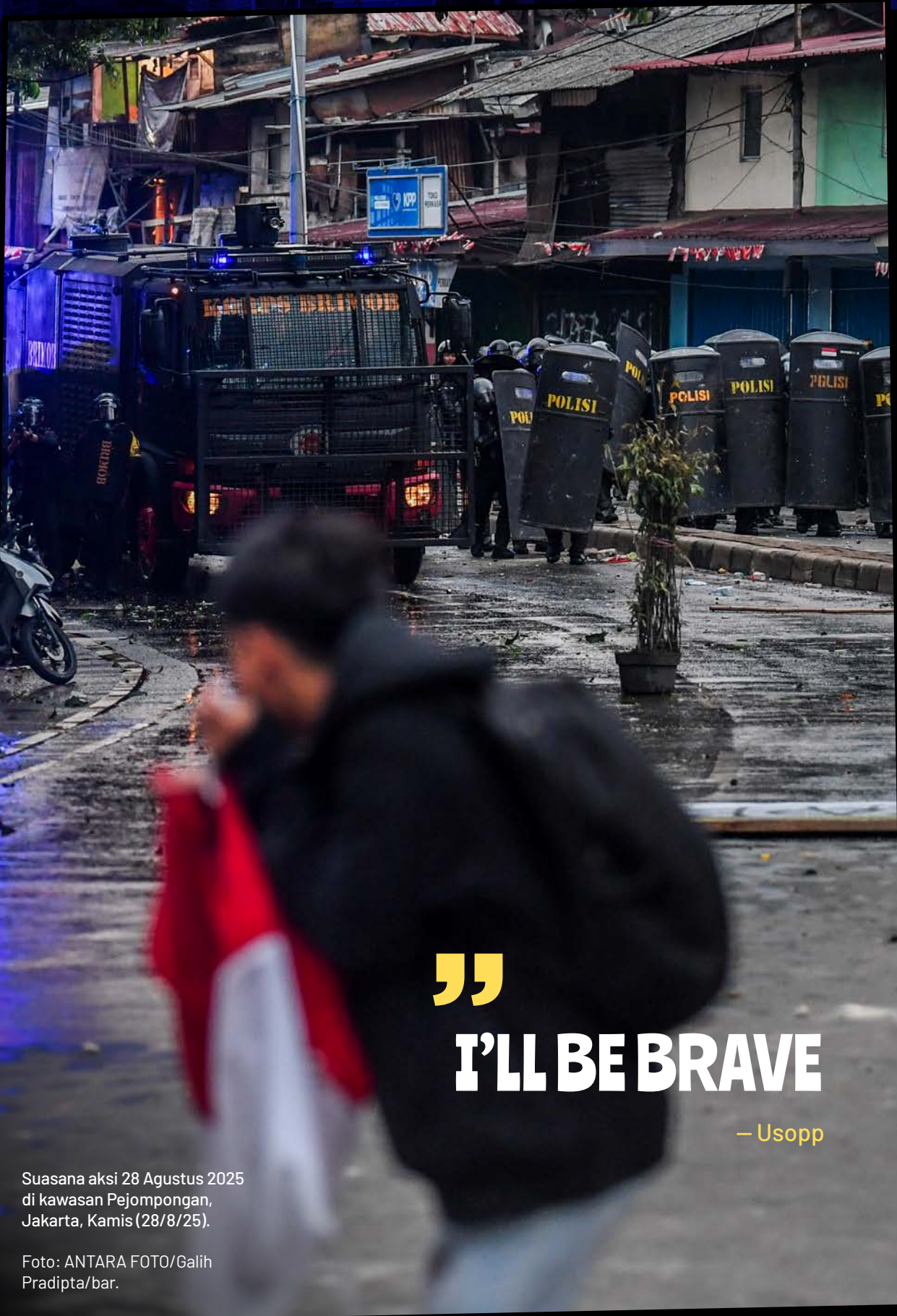
{52}



PERNYATAAN
AUDIT



KATA PENGANTAR



”

I'LL BE BRAVE

— Usopp

Suasana aksi 28 Agustus 2025
di kawasan Pejompongan,
Jakarta, Kamis (28/8/25).

Foto: ANTARA FOTO/Galih
Pradipta/bar.



Untuk Kita yang Memilih Bertopi Jerami

Laporan tahunan Yayasan Kurawal 2024 ini tiba di tengah krisis politik. Organisasi masyarakat sipil semakin terdiskoneksi dengan konstituennya, jargon demokrasi kehilangan daya untuk menggerakkan massa, dan ruang ekonomi dan politik formal semakin dikuasai oleh kepentingan oligarki.

Kita dihadapi dengan pertanyaan: Bagaimana cara membangun bahasa politik yang membangkitkan solidaritas lintas-sekat?

Kurawal menggunakan narasi *One Piece* dalam laporan ini bukan hanya sebagai ekspresimen kreatif. *One Piece* memberikan kerangka berpikir dan respons strategis terhadap kenyataan tentang senjang yang terbentang. Bahasa politik konvensional berbasis jargon demokrasi belum juga

berhasil menyambung tradisi perlawanan yang diwarisi sejak gerakan anti-otoritarianisme 1990-an dengan aktivisme kontemporer—terutama mereka yang datang dari generasi yang akan menanggung konsekuensi jangka panjang dari kemunduran demokrasi Indonesia.

Kurawal mengajak “kita” memilih “bertopi jerami”. Kita—aktivis dengan pengalaman sejarah Reformasi, mahasiswa yang frustrasi dengan uang kuliah yang semakin tinggi, supir ojek *online* yang bekerja tanpa jaminan kesehatan apalagi jaminan kecelakaan kerja, dan buruh pabrik yang kerap diputus kontraknya—sebenarnya tengah berbagi pengalaman yang pada dasarnya sama. Kita sama-sama hidup di dalam sistem yang tidak adil dan timpang, dan ada sekelompok kecil orang-orang yang hidup enak-enakan.



Pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia atau Garda melakukan aksi di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3).

Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama.



Meski mungkin menggunakan bahasa yang berbeda untuk menggambarkannya, kita-sama-sama merasakan bagaimana kekuasaan cenderung memusat dan juga melayani kepentingan segelintir orang. Ada yang menyebutnya “oligarki”, ada lagi yang menamakannya “elite”, ada yang bilang “orang kaya” (*the rich*), atau “orang-orang dengan impunitas”. Tapi, kita sebenarnya sama-sama bicara tentang mereka yang diuntungkan dari ketidakadilan dan ketimpangan, dan bahwa kita, dengan cara berbeda, adalah pihak yang dirugikan.

Pengalaman ketidakadilan dan ketimpangan adalah fondasi solidaritas kita yang memilih bertopi jerami. Bisa jadi ada buruh yang bertutur tentang upah stagnan dan kebutuhan pokok naik, dan ada akademisi yang berbicara mengenai ketimpangan struktural, tapi sebenarnya mereka sedang membicarakan kenyataan yang sama dari posisi sosial yang berbeda. Begitu pula dengan para aktivis veteran dan ibu berjibab *pink*; mereka mungkin menggunakan kosakata yang berbeda, tapi keresahan yang mendorong mereka turun ke jalan bisa jadi secara prinsip sama. Satu bilang “penyempitan ruang sipil”, yang lain berteriak “turun tahta”. Mereka semua sedang mengekspresikan kemarahan tentang sistem kekuasaan yang tidak memberi ruang untuk aspirasi politik orang biasa.

Di sinilah narasi *One Piece* jadi penting. Bukan karena *anime* ini memberikan solusi politik siap pakai, tapi karena ia menawarkan kerangka berpikir populer (*populi*; *the people*) untuk memahami dan merasakan bagaimana oligarki bekerja dan bagaimana solidaritas bisa dibangun dari lintas perbedaan latar belakang. “Tahta Kosong” yang dikuasai diam-diam oleh kekuatan yang tersembunyi adalah gambaran tentang struktur kuasa yang tak terlihat, sementara kru yang datang dari latar belakang berbeda tapi memilih berlayar di bawah satu panji menunjukkan bagaimana kebersamaan bisa lahir dari keberagaman. Kita yang memilih bertopi jerami sedang membangun jembatan bahasa untuk saling memahami pengalaman satu sama lain di tengah ketidakadilan dan ketimpangan.

Dari laporan ini kita mengenali bahwa bahasa lebih dari alat komunikasi, ia membentuk realitas dan praktik politik. Bahasa mengundang pembicaranya dan penyimaknya untuk menjadi subjek politik, mengajak bersama-sama memahami dan melawan kekuasaan, dan membangun imajinasi kemungkinan perubahan dan dunia seperti apa yang ingin direalisasikan.

Solidaritas lahir ketika setiap orang tahu perannya dan berdiri untuk satu sama lain, bukan berjalan sendiri.

Laporan ini mendokumentasikan perjalanan Kurawal dan semua yang terlibat dalam jejaring kerjanya, seperti kru Topi Jerami yang masing-masing punya keahlian yang saling mengisi. Ada yang jago berstrategi dan navigasi, ada yang teguh berprinsip, ada pula yang memastikan semua orang kenyang dan terawat, hingga ada yang bergabung karena ingin menyembuhkan luka-luka lama.

Solidaritas dibangun bukan dari keseragaman atau sekadar perayaan keberagaman, melainkan dibentuk dari kru yang tahu siapa dirinya, apa kelebihanannya, dan bagaimana perannya untuk satu sama lain supaya sampai ke tujuan bersama-sama—bukan sendiri-sendiri—menghadapi dunia yang semakin menindas.

Seperti yang dikatakan Luffy, “*I don’t want to conquer anything. I just think the guy with the most freedom in this whole ocean... is the Pirate King!*”.

Mungkin, kalau pernah kita sampai ke tujuan bersama, kita juga sudah cukup paham satu sama lain untuk mengenali bahwa “harta karunya” adalah ketika tidak ada lagi yang harus memilih antara makan atau berobat, antara sekolah atau kerja, antara bermimpi atau bertahan hidup.

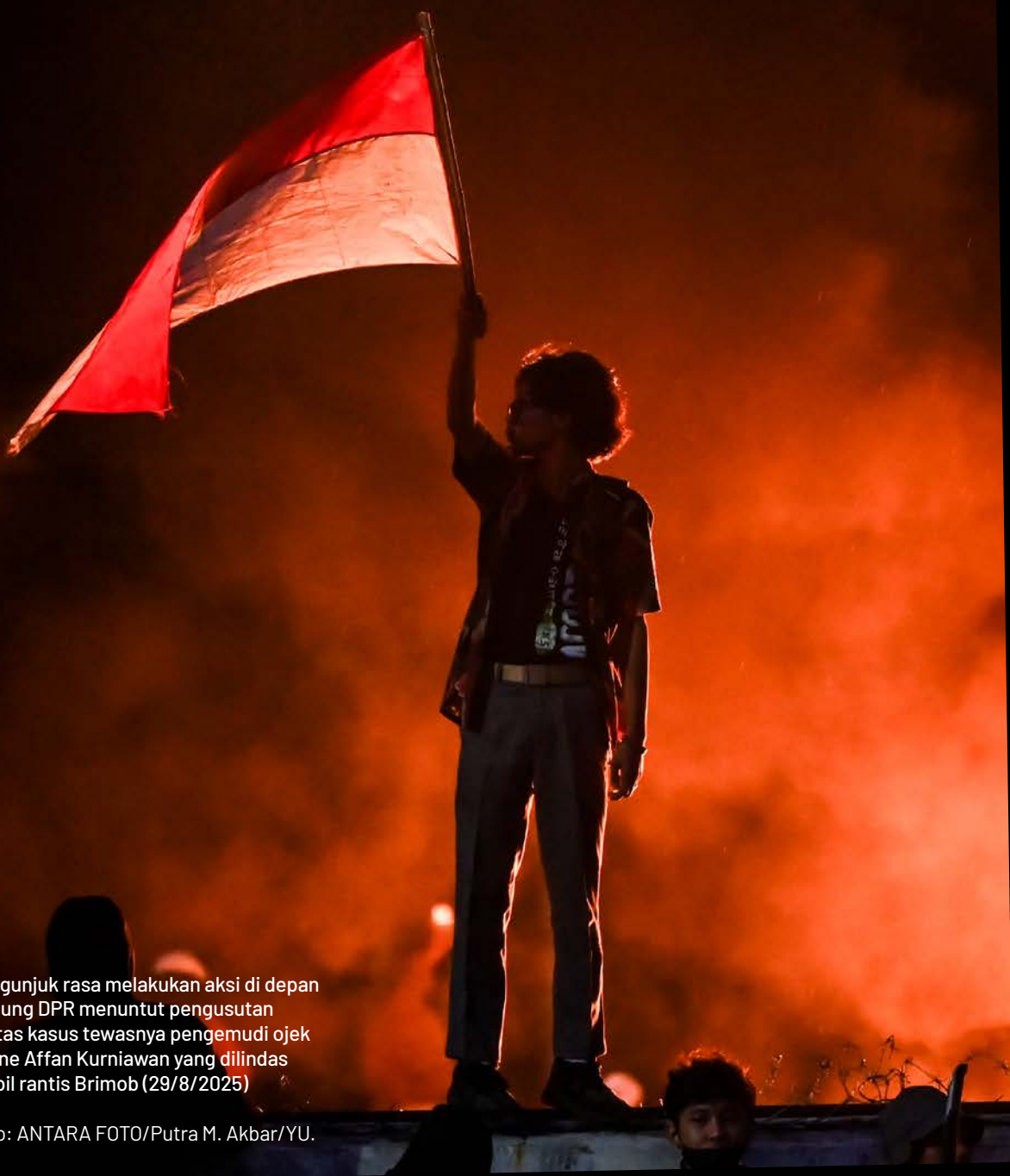
Tapi sampai saat itu tiba, kita terus berlayar!

PROLOG



**ONLY THOSE WHO HAVE
SUFFERED LONG CAN SEE THE
LIGHT WITHIN THE SHADOWS.**

— Roronoa Zoro



Pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Gedung DPR menuntut pengusutan tuntas kasus tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Brimob (29/8/2025)

Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU.



Indonesia Tidak Seindah Dunia Dora

Suatu pagi, seorang anak menatap layar televisi sambil meloncat-loncat kecil. Anak itu sedang menonton acara favoritnya, *Dora the Explorer*. Dora bersama sahabatnya Boots sedang mengajaknya berinteraksi. "Kita butuh bantuanmu!" serunya di layar, "Tunjukkan jalan ke Gunung Berapi!" Sang anak menunjuk ke arah kanan, berteriak, "Di situ!" Lalu Dora, seolah merespons jeritan si anak, berjalan ke jembatan yang mengarahkan ke Gunung Berapi. Anak itu merasa gembira, berkat perannya Dora dan Boots berhasil menyelesaikan misi.

Tidaklah adegan ini terasa akrab? Seperti parodi halus dari keyakinan kita: demokrasi mustahil hidup tanpa partisipasi warga negara. Klaim yang terasa dekat, terutama di masa Pemilu. Seperti Dora yang sejatinya tak memerlukan bantuan penonton, kekuasaan pun tak butuh suara kita untuk tetap berjalan.

Tahun 2024, kita adalah anak itu.

Di panggung demokrasi Indonesia, Pemilu digelar seperti sebuah episode Dora. Kita merasakan adanya fitur interaktif yang memungkinkan kita sebagai

masyarakat berinteraksi dengan penguasa, kita juga disediakan pilihan, bahkan ada pesta dan sorak-sorai kemenangan. Namun seperti Dora yang sebenarnya tak butuh bantuan penonton untuk menyeberangi jurang, kekuasaan pun tak butuh suara kita untuk tetap bertahan. Pemilu 2024 menjadi tontonan di mana aturan diubah sekehendak rezim, aparat dikerahkan seperti properti panggung, dan pelanggaran diabaikan seperti adegan yang sengaja diedit dan dipotong.

Seruan "Kita butuh bantuanmu!" menjelma lelucon getir. Kita diyakinkan bahwa suara kita sakral, tapi kesakralannya itu dipasung dalam ruang lobi kekuasaan. Kita boleh berteriak, tapi narasi tetap tak boleh terganggu. Kita diajak berinteraksi, tapi hanya sebagai penonton yang diizinkan bergumam sesekali tanpa mempengaruhi hasil negosiasi. Seperti Dora yang bergerak dalam dunia yang sudah dipetakan, politik 2024 mencerminkan panggung di mana segelintir elit memegang kendali. Kamera sudah berjalan, peran telah ditentukan. Rakyat sebagai nyawa demokrasi direduksi menjadi "surat suara".

Ini, sesungguhnya, lebih menusuk dari sekadar curang.



Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto usai menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan.

Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU.



Sejak era Joko Widodo, masyarakat sipil perlahan dijinakkan. Aktivis yang dulu berderap di jalanan, kini dihisap ke dalam lubang hitam kekuasaan sebagai staff khusus, para ahli, deputi menteri hingga komisariss badan usaha milik negeri. Organisasi masyarakat dengan jutaan umat pun dibuai dengan konsesi dan diubah menjadi figuran tukang stempel kebijakan pembangunan. Interaksi, dialog, dan segala aktivitas yang mencerminkan kolaborasi semua dijadikan properti untuk menguatkan ilusi guna menutupi monolog kekuasaan. Kita tak lagi diharap melawan, hanya menikmati peran sebagai penonton yang kadang bisa marah, kadang menangis atau bertepuk tangan. Demokrasi pun menjelma tontonan yang harus dinikmati, bukan dipertanyakan. Kita menjelma subjek yang diandaikan tidak tahu apa-apa dan hanya bisa bisung, sementara agensi politik kita diambil alih oleh rakyat bayangan seperti para *buzzer*, *influencer* politik, massa bayaran, pemilih fanatik, dan figur-figur lain yang menjaga ilusi bahwa sistem ini masih hidup.

Barangkali yang lebih genting bukanlah soal kebohongannya, melainkan bagaimana kita—dengan sadar—memilih untuk bermain dalam kebohongan itu. Seperti anak yang tahu Dora tak mendengarnya, kita pun tahu bagaimana kita tidak didengarkan. Namun, kita tetap berpartisipasi, karena di balik kepasifan ada semacam kepuasan telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, meski tahu diri kita hanya avatar tanpa cangkang. Inilah tragedi yang lebih menyedihkan dari sekadar manipulasi pemilu, demokrasi menjadi hiburan semata. Pelanggaran etik, represi terhadap oposisi, dan monopoli narasi tidak lagi terasa nyata, melainkan liukan plot yang kita tunggu. Semua terasa seperti sedang menonton sinetron yang kita tonton dengan sinis sambil menunggu episode berikutnya, dan perlahan meyakini bahwa tak ada yang bisa diharapkan, tak ada yang bisa diubah, tak banyak yang bisa dilakukan.

Melalui laporan tahunan ini, Kurawal ingin mengajak warga untuk keluar dari pakaian layar penuh warna. Sudah saatnya kita beranjak ke luar rumah untuk benar-benar menjelajah sudut-sudut kenyataan karena Indonesia bukanlah dunia Dora.

Realita kita jauh dari ceria. Tidak ada Boots, Dora, Swiper dan kawan-kawannya yang akan menanti kita di penggal jalan. Yang ada adalah dunia kelimat penuh intrik, di mana karakter-karakternya bukanlah sahabat, melainkan penguasa dan penindas. Mari berjumpa dengan Sakazuki Akainu—admiral angkatan laut yang menegakkan kekuasaan dengan tangan besi, Rob Lucci—pentolan badan intelijen *CPO* yang tugasnya memata-matai dan menyingkirkan

“
Dominasi oligarki hanya dapat diguncang oleh jiwa-jiwa bebas yang tak pernah henti menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru.”

oposisi, Jaygarcia Saturn—anggota *Gorosei* yang mengendalikan *Pemerintah Dunia*, dan Kaido—bajak laut keji yang menebar ketakutan demi dominasi.

Ya, Indonesia kini adalah halaman gelap dari kisah *One Piece*. Sebuah negeri di mana *Imu* mengorkestrasi kuasa dari bayang-bayang gulita *Tahta Kosong* dan menjadikan lima sesepuh *Gorosei* sebagai wajah tamak *Pemerintah Dunia*. Mereka menjanjikan stabilitas dan kedamaian bagi warga namun entitas ini merupakan struktur oligarki yang korup dan tak segan menindas warga untuk melanggengkan kuasanya. *Pemerintah Dunia* dibentuk bukan oleh suara warga melainkan oleh warisan kekuasaan. Dua puluh keluarga pendirinya menjelma menjadi *Tenryuubito* atau *Bangsawan Dunia*, mereka menjulang tinggi di atas hukum, tak tersentuh oleh kritik warga jelata, dan kebal terhadap pertanggungjawaban.

Dalam parabel tersebut, kita harus ingat bahwa dominasi oligarki hanya dapat diguncang oleh jiwa-jiwa bebas yang tak pernah henti menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru, seperti halnya



Pengunjuk rasa melakukan aksi 29 Agustus 2025 di dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menuntut pengusutan tuntas kasus tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang ditabrak mobil rantis Brimob (29/8/2025).

Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

para bajak laut budiman kru Topi Jerami di bawah Kapten Monkey D. Luffy. Luffy adalah bajak laut muda yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut—bukan dengan tirani, namun dengan mempersatukan warga dan menciptakan dunia baru di mana semua orang bebas dan setara. Pelayaran kru Topi Jerami bersama Luffy adalah perjalanan untuk membangunkan yang tertindas, membangun armada dan menyulut perlawanan akar rumput atas penindasan *Pemerintah Dunia*.

Dalam cengekraman oligarki, mimpi Luffy dan kru Topi Jerami adalah mimpi kebanyakan dari kita. Kibaran bendera *Jolly Roger* di berbagai ruang warga sepanjang Agustus lalu di saat kita memperingati delapan puluh tahun proklamasi menunjukkan meleknya publik atas kemiripan parabel *One Piece* dengan sengkarutnya kondisi negeri. Kibaran bendera tersebut adalah suar awal bahwa kesewenang-

kewenangan penguasa—cepat atau lambat—akan berbenturan dengan perlawanan warga.

Jika kekuasaan adalah permainan yang telah diprogram, tugas kita bukan meneriakkan jawaban ke layar melainkan mematikan televisi. Gerakan sosial yang berakar dan terorganisir adalah upaya untuk menulis ulang naskah—bukan dengan menjadi antagonis dalam episode yang sama, tapi dengan membangun panggung tandingan.

Saatnya mematikan televisi dan menyiapkan kru serta perahu layar. Tidak ada Boots, Dora, Swiper dan kawan-kawannya yang akan menanyakan arah perjalanan. *Tahta Kosong*—sang demokrasi semu—sudah seharusnya dirobohkan dan tidak lagi dirayakan.

Bentangkan layar dan kibarkan bendera, karena Indonesia tidak seindah dunia Dora.

BANGKITNYA PARA BAJAK LAUT BUDIMAN



”

**IF YOU DON'T TAKE
RISKS, YOU CAN'T
CREATE A FUTURE**

— Monkey D. Luffy

Mahasiswa bersama pengemudi ojek daring berunjuk rasa di Mapolda Sumatera Barat meminta transparansi penyelidikan kasus kematian Affan Kurniawan di Padang (29/8/2025).

Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/rwa.



2.1. Titik Balik Pemilu 2024: Memperkarakan Tahta Kosong

Dalam tinjauannya tentang kualitas pemilihan umum (pemilu) yang terjadi sepanjang tahun 2024, Dominic Eggel, Gregoire Mallard dan Marc Galvin menyatakan bahwa menurunnya kualitas pemilihan umum sepanjang dua puluh tahun terakhir telah mengendurkan kaitan langsung antara proses pemungutan suara dan penguatan demokrasi di banyak negara.¹ Pemilu bukan lagi instrumen untuk menagih akuntabilitas penguasa serta memfasilitasi rotasi kekuasaan secara demokratis. Namun, pemilu telah berubah menjadi prosesi banal bagi legitimasi perpanjangan masa jabatan sang adikara.

Prosesi yang sama berlangsung dengan sangat efisien dalam Pemilu 2024—khususnya pemilihan presiden (pilpres)—di Indonesia. Satu tahun sebelumnya, dunia maya dipenuhi beragam spekulasi politik. Di tengah senyapnya bursa kandidat pasangan calon, perdebatan soal batas usia calon presiden dan wakil presiden merebak. Sebagian dari kita tahu ke mana arah permainan ini, namun tetap saja berharap agar tidak ada marka jalan yang dirobohkan. Tapi seperti *plot twist* murahan yang sudah ditebak, ia tetap menyakitkan saat datang. Pada penghujung Oktober, pengumuman itu tiba: Prabowo memilih Gibran sebagai kandidat wakil presidennya.



Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) berjoget saat berkampanye di Tasikmalaya, Jawa Barat (2/12/2023).

Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

¹ Dominic Eggel, Gregorie Mallard, dan March Galvin, "Do Elections Still Serve Democracy?" *Global Challenge* 16, November 2024, <https://globalchallenges.ch/issue/16/when-elections-no-longer-serve-democracy/>



Dunia seolah melambat. Ada yang terdiam. Ada yang tertawa sinis. Tapi hampir semua dari kita merasakan satu hal, dinding ilusi demokrasi yang kian tahun kian goyah itu akhirnya runtuh dengan paripurna. Pilpres yang selama ini dicitrakan sebagai arena transisi kekuasaan yang jujur dan adil, ternyata hanyalah panggung boneka di mana tali-talinya ditarik dari belakang layar. Ini mungkin sebuah lengkungan cerita paling menusuk yang kita alami pasca-Reformasi. Di dalamnya, ada pengkhianatan, perpisahan yang menyayat, dan upaya penyangkalan yang berlarat-larat.

Pemilu 2024 pada akhirnya tidak lebih dari panggung ilusi *Tahta Kosong* di kisah *One Piece*. *Tahta Kosong* adalah singgasana megah di *Mary Geoise*, pusat kekuasaan *Pemerintah Dunia*, yang dibangun oleh aliansi dua puluh kerajaan pemenang *Perang Besar* melawan *Kerajaan Kuno* pada 800 tahun yang lalu. Kursi agung itu dikesankan selalu kosong dan tidak seorangpun diizinkan mendudukinya, termasuk lima sesepuh *Gorosei* dan para *Bangsawan Dunia*. *Tahta Kosong* merupakan simbolisme bahwa tidak ada penguasa tunggal dalam *Pemerintah Dunia*, sebuah pesan perdamaian dengan menekankan kesetaraan di antara para *Bangsawan Dunia*. Tidak ada yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari lainnya.

Padahal, di balik ilusi kesetaraan tersebut terdapat *Imu*, penguasa tunggal yang secara rahasia menduduki *Tahta Kosong* di *Istana Pangea*. Meskipun secara publik *Gorosei* dianggap sebagai otoritas tertinggi, sebenarnya mereka semua tunduk dan melayani *Imu*. Dia diam-diam mengontrol dan memberi arahan kepada *Gorosei*, dalam bertindak. *Imu* adalah kuasa oligarki yang menjerat semua relasi politik di dalam *Pemerintah Dunia* dan praktiknya terhadap warga di dunia *One Piece*.

Di bawah kendali oligarki, seperti halnya dalam kisah *One Piece*, Pilpres 2024 dikelola menyerupai *Lively*, sebuah pertemuan empat tahunan para raja dari negara-negara bawahan *Pemerintahan Dunia*. Mereka pura-pura berkumpul untuk membahas masa depan bersama. Namun kenyataannya, seluruh proses sudah dikendalikan oleh kekuatan pusat sejak awal, dan keputusan-keputusan penting tetap berada di tangan segelintir elit.

Rakyat memang dapat memilih, tapi pilihan mereka sudah terlebih dahulu dibatasi oleh konfigurasi kuasa: siapa yang punya modal, siapa yang menguasai media, dan siapa yang menentukan arah narasi. Tidak ada sosok alternatif yang benar-benar lahir dari bawah, dari pengalaman perlawanan, ketidakadilan, dan keberanian untuk melawan tatanan yang sudah

mapan. Yang ada hanyalah kandidat-kandidat yang telah disaring, dibentuk, atau dibekingi oleh sistem itu sendiri. Dengan membandingkan bagaimana *Lively* bekerja di *One Piece* dengan pengalaman riil warga di kontestasi politik 2024, kita bisa melihat bahwa demokrasi formal yang tidak disertai distribusi kuasa dan transparansi justru melanggengkan *status quo*, bukan mengubahnya.

Kurawal melihat Pilpres 2024 sebagai titik balik untuk menelanjangi ilusi demokrasi dengan memperkarakan *Tahta Kosong*; membangun para warga dari sibir layar kaca dunia *Dora*. Atas dasar ini, Kurawal mendukung kerja-kerja *Asian Network for Free Elections* (ANFREL) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia untuk secara sistematis mendokumentasikan manipulasi kuasa dan praktik-praktik curang yang berlangsung. Keduanya melakukan kerja pemantauan yang saling melengkapi: pengawasan eksternal yang memaksa transparansi dalam sistem yang cenderung tertutup dan investigasi mendalam para jurnalis terhadap praktik-praktik tersembunyi di tingkat akar rumput.

“
Di Pemilu 2024,
kita melihat
bahwa demokrasi
formal yang tidak
disertai distribusi
kuasa dan
transparansi justru
melanggengkan
status quo, bukan
mengubahnya.”



Bagi Kurawal, kolaborasi ini semacam upaya untuk membangun pohon pengetahuan tandingan. Belajar dari *One Piece*, pengetahuan tandingan adalah usaha kecil tapi penting dalam pertarungan panjang melawan kekuasaan licik seperti *Pemerintah Dunia*. Dalam cerita itu, para protagonis yang menantang kekuasaan bukanlah orang-orang suci atau kaum intelektual, melainkan mereka yang lahir dari kehidupan sehari-hari: bandit yang terpaksa jadi bandit karena kondisi politik, pemalas yang terusir dari sistem, mereka yang dapurnya kena meriam saat sedang memasak, atau orang biasa yang memikul trauma dan luka. Di dunia nyata, kita menyebut mereka sebagai bagian dari “gerakan akar rumput”, tetapi kita kerap memperlakukan istilah itu secara pasif, seolah-olah mereka hanya akan bergerak ketika digerakkan oleh aktivis atau patron intelektual. Padahal, kekuatan utama dari akar rumput dan aktivisme adalah kesediaan keduanya untuk saling mempercayai dan saling mengoreksi, bukan saling meromantisasi atau menyalahkan. Dari sinilah Kurawal percaya bahwa pengawasan pemilu independen dan kerja jurnalis investigatif yang menggali praktik-praktik curang di wilayah-wilayah yang sering dilupakan dapat melahirkan bentuk-bentuk keberanian politik. Keberanian untuk tahu, untuk bersuara, dan untuk bergerak.

Kolaborasi ini bukan semata intervensi teknokratik. Ia lahir dari keprihatinan kolektif dan keinginan untuk menciptakan tekanan moral—baik ke dalam maupun ke luar.

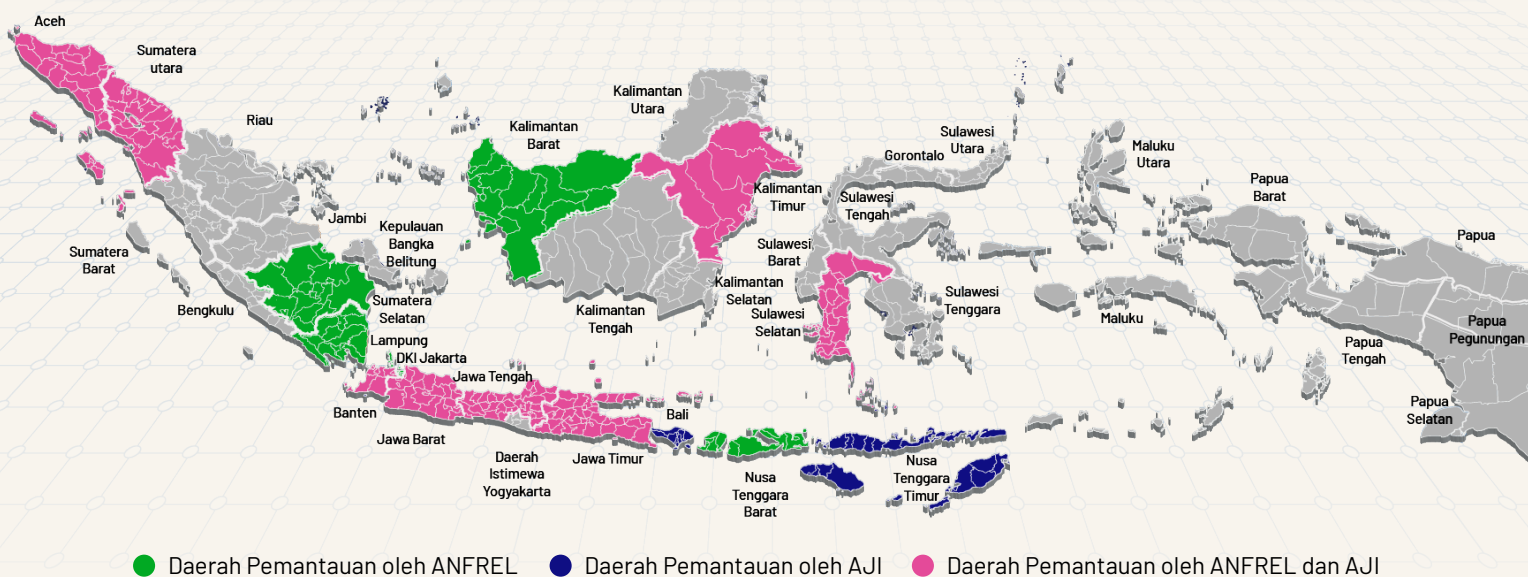
“Kita ingin memperlihatkan ke dunia, khususnya regional Asia, bagaimana proses Pemilu 2024 itu berjalan. Harapannya, dunia internasional bisa lihat langsung: ‘oh ternyata begini loh prosesnya’, dan itu bisa jadi alarm juga buat penyelenggara dan peserta pemilu,” ujar pegiat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).²

Bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), JPPR menjadi ujung tombak dari pelibatan ANFREL secara langsung ke lapangan. Misi mereka bukan untuk membuat kegaduhan, tapi untuk mendokumentasikan pelanggaran yang menciderai sahnyanya pemilu—tak hanya secara hukum, tapi juga secara etis dan substansial.

Kerja-kerja pemantauan itu bukan tanpa rintangan. Intervensi kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk intimidasi langsung. Ia menjelma dalam kebijakan yang berubah tiba-tiba, regulasi yang ditulis ulang untuk melayani kepentingan sempit, atau praktik kampanye yang secara formal sah, tapi secara substansi amat buruk.

“Hal-hal seperti intervensi pemerintah itu agak sulit untuk dideteksi secara langsung. Karena sifatnya sangat politis dan enggak terlihat di lapangan. Tapi kita bisa melihat indikasi-indikasinya dari regulasi, seperti perubahan mendadak dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.”³

LOKASI PEMANTAUAN PEMILU 2024 OLEH ANFREL DAN AJI INDONESIA



Sumber: ANFREL dan AJI Indonesia

²Wawancara dengan pegiat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), salah satu mitra lokal ANFREL di Indonesia.

³Wawancara dengan pegiat JPPR.



MENELANJANGI “TAHTA KOSONG”, TEMUAN ANFREL ATAS PEMANTAUAN PEMILU 2024



Bansos jadi alat politik.

Fasilitas negara dipakai untuk menguntungkan kandidat jagoan Presiden Jokowi, menciptakan persaingan yang tak adil.



Hukum dibelokkan demi elite.

Putusan MK soal usia cawapres membuka jalan bagi Gibran — bukti hukum tunduk pada kekuasaan, bukan integritas.



“Wasit” ikut bermain. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu gagal netral, sementara Bawaslu sebagai pengawas lamban dalam menangani pelanggaran.



Uang mengalahkan gagasan.

Kandidat bermodal besar menguasai ruang kampanye, sedangkan pelanggaran politik uang dibiarkan tanpa sanksi tegas.



Jurnalis dibungkam, publik dibutakan.

Intimidasi dan serangan terhadap media melemahkan pengawasan pemilu oleh publik.



Dana kampanye besar, tapi minim transparansi.

Laporan keuangan kampanye tak terbuka dan auditnya lemah sehingga membuat aliran dana kampanye sulit dilacak—celah lebar bagi korupsi politik.

Sumber: Laporan Akhir Misi Pemantauan Pemilu oleh Ahli Internasional ANFREL (IEEOM) pada Pemilu 2024 di Indonesia

Salah satu contoh paling mencolok tentunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon wakil presiden—keputusan yang keluar di tengah jalan, memuluskan jalan Gibran menuju pencalonan, bahkan kemenangan. Hal-hal seperti itulah yang membuat proses pemilu kita jadi terlihat tidak ajeg karena semuanya bisa berubah tergantung momentum politik. Ini bukan hanya soal satu nama, tapi soal preseden: ketika hukum bisa dibengkokkan, maka demokrasi menjadi sekadar panggung, bukan proses bermakna. Seharusnya pemilu tidak hanya semata jadi formalitas demokrasi. Harus ada substansi, *fairness*, dan perlindungan terhadap integritas informasi yang disampaikan kepada publik.

Di tengah kondisi yang makin gelap, kerja-kerja seperti ini mungkin tampak kecil. Tapi, seperti dalam *One Piece*, keberanian bukan monopoli raksasa. Ia muncul dari keputusan sehari-hari: untuk tetap peduli, untuk terus mencatat, dan untuk melawan lupa. Mungkin kita tidak bisa menghentikan

Pemerintah Dunia sendirian, tapi kita bisa memastikan bahwa setidaknya, mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak.

Kurawal tahu bahwa keberanian tak selalu datang dalam bentuk heroik. Kadang, ia tampil sebagai koordinasi yang berantakan, kerja teknis yang kehabisan waktu, atau liputan investigatif yang lahir dari semangat. Di lapangan, kerja-kerja AJI Indonesia bersama Themis dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memperlihatkan bagaimana jurnalisme tidak menunggu kondisi ideal untuk bergerak, ia justru bekerja karena kondisi tak ideal itu makin nyata. Menurut AJI Indonesia, kolaborasi lintas organisasi ini lahir bukan dari kemewahan waktu, sumber daya, atau anggaran, tapi dari kegelisahan bersama atas apa yang mungkin terjadi ketika pemilu hanya jadi satu putaran dan dimenangkan oleh kandidat dengan rekam jejak otoriter. Di tengah kegentingan, kita juga perlu menyadari bahwa jika dibiarkan sendiri-sendiri, semua inisiatif akan tenggelam dalam sekat bilik masing-masing organisasi.



Jurnalisme investigatif memiliki peran yang sangat besar sebagai penyeimbang dalam lanskap demokrasi yang dipenuhi manipulasi, terutama ketika mekanisme *check and balance* formal melemah. Meskipun kerja-kerja masyarakat sipil dan media seringkali berlangsung secara terpisah dan kurang terorkestrasi, investigasi tetap menjadi sumbu kecil dalam perlawanan terhadap dominasi narasi tunggal. Dalam kondisi yang terpecah dan penuh kegagapan, liputan terhadap kasus-kasus kecurangan pemilu serta proyek-proyek pembangunan rezim yang sarat konflik kepentingan menjadi upaya penting untuk menunjukkan bahwa informasi tidak bisa dimonopoli, dan bahwa kebenaran tetap bisa disuarakan dari luar lingkaran kekuasaan.

Temuan di lapangan memang bikin pilu dan malu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seakan membiarkan pelanggaran elektoral dari intimidasi pemilih, pendanaan gelap, hingga penyalahgunaan sumber

daya negara. Di lapangan, AJI Indonesia juga menemukan manipulasi terbuka. KPU ditekan mengubah verifikasi partai, tetapi para pelanggar dilepas, dan pelaporan ke Bawaslu mentok pada dalih formalitas. Di dalam *One Piece*, ada juga kelompok yang berperilaku seperti ini. Mereka adalah *Shichibukai*, kelompok tujuh bajak laut kuat dan berbahaya namun justru diberi status legal oleh *Pemerintah Dunia*. Tujuan pembentukan mereka adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebagai imbalan, mereka dibiarkan bebas melakukan pelanggaran selama tetap berguna bagi pemerintah. Begitu pula dalam Pemilu 2024. Negara membangun persekutuan gelap dengan menggunakan sumber daya yang berada di dalam genggamannya. Mereka yang semestinya menjadi wasit yang netral, justru tampak membiarkan kekuatan politik tertentu melanggar aturan demi memelihara keamanan dan stabilitas politik yang melanggengkan kekuasaan mereka.

WAJAH GELAP PEMILU 2024

Pemilu serentak 2024 disebut pesta demokrasi terbesar, tapi yang tampak justru praktik kecurangan yang meluas—baik di pilpres maupun pileg. Di banyak daerah, kecurangan pileg bahkan lebih masif.



Rakyat dijadikan sasaran jual beli suara di banyak daerah. Politik uang masih marak, dari doorprize rumah dan mobil, amplop uang tunai, hingga transfer e-money.



Fasilitas negara dipakai untuk kepentingan kandidat. Acara resmi pemerintah bahkan diubah jadi panggung politik, lengkap dengan simbol capres tertentu.



Bansos jadi alat kampanye. Di sejumlah daerah, warga diancam akan kehilangan bansos jika tak mendukung calon tertentu.



KPU dan Bawaslu terlibat pelanggaran etik dan suap, mulai dari pelanggaran etik oleh KPU Pusat ketika menerima pencalonan Gibran, manipulasi verifikasi parpol oleh KPU daerah, hingga kasus suap komisioner Bawaslu Medan.

Meski laporan dan pemantauan kecurangan Pemilu disajikan penuh data dan temuan tajam, semuanya seakan tak berarti. Tanpa institusi yang mau

mendengar, semua usaha itu karam begitu saja. Bahkan film dokumenter *Dirty Vote* yang ditonton 20 juta kali pun tak mampu menggoyahkan hasil Pemilu 2024.



DIRTY VOTE, PEMILU 2024 DARI BALIK LAYAR



Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono yang dirilis pada 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang Pemilu 2024 dengan dukungan Kurawal. Dalam durasi hampir dua jam, tiga ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, mengupas tuntas dugaan kecurangan yang berpotensi memenangkan Prabowo-Gibran, mulai dari praktik politik uang, penyalahgunaan perangkat negara, hingga tekanan terhadap pegawai negeri sipil. Film ini bukan sekadar liputan; ia adalah hasil kajian mendalam dari riset yang dikembangkan sangat hati-hati agar informasinya tetap akurat dan kredibel.⁴

Penerimaan publik atas *Dirty Vote* beragam: sebagian menyebutnya membuka mata—menyguhkan kritik sistemik terhadap penyelenggaraan demokrasi, sebagian lain menuduhnya fitnah. Sutradara dan ketiga akademisi film ini bahkan dilaporkan ke polisi atas tuduhan kampanye hitam oleh pendukung Prabowo-Gibran, tapi mendapat dukungan kuat dari koalisi masyarakat sipil. Koalisi tersebut menegaskan bahwa film ini justru memperkuat kontrol sosial dan hak publik, karena disusun berdasarkan fakta dan riset independen, bukan untuk merugikan atau menguntungkan kandidat tertentu.⁵ Menurut Dewan Pers, meski *Dirty Vote* bukan produk jurnalistik konvensional, materi yang disajikannya berbasis bukti dan analisis akademis, bukan narasi palsu—sebuah afirmasi bahwa kritik seperti ini masih penting dalam menjaga integritas demokrasi.⁶

Sumber: BandungBergerak (2024) dan BBC News Indonesia (2024)

⁴"Ramai Diperbincangkan, Film "Dirty Vote" Ungkap Kecurangan Menjelang Pemilu 2024," *FISIPOL UGM*, 13 Februari 2024, <https://fisipol.ugm.ac.id/ramai-diperbincangkan-film-dirty-vote-ungkap-kecurangan-menjelang-pemilu-2024/>

⁵Muhammad Akmal Firmansyah, "Mengkriminalkan Tim Film dan Narasumber *Dirty Vote*, Membungkam Masyarakat Kritis," *BandungBergerak*, 16 Februari 2024, <https://bandungbergerak.id/article/detail/159548/mengkriminalkan-tim-film-dan-narasumber-dirty-vote-membungkam-masyarakat-kritis>

⁶"Dirty Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana publik harus menyikapinya?," *BBC News Indonesia*, 13 Februari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o>



Satu tahun setelah nama Gibran Rakabuming resmi menjadi cawapres, pada 21 Oktober 2024, Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029.

"Demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana

mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, adu domba, hasut-menghasut. Harus yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan".⁷

Dengan ini, maka Pemerintah Indonesia semakin menyerupai Pemerintah Dunia dalam *One Piece*. Kekuasaan yang melanggengkan familikrasi, berkuasa absolut, korup dan penuh tipu daya. Dan kita akan hidup di dalamnya selama lima tahun ke depan.



Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelukan usai dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (20/10/2024).

(foto ini diedit dengan AI, tanpa mengubah esensi)
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app.

⁷Aryo Putranto Saptohutomo, "Isi Lengkap Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Usai Pelantikan," *Kompas.com*, 20 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/13344741/isi-lengkap-pidato-perdana-presiden-prabowo-subianto-usai-pelantikan?page=2>



2.2. Suara dari Akar Rumput – Menentukan Arah Menuju *Grand Line*

Beranjak dari ilusi bukanlah perkara sederhana bagi kebanyakan dari kita. Dunia nyata bukanlah sebuah lintasan garis lurus yang menjanjikan akhir bahagia di ujung pelangi. Realita ditaburi fakta dengan makna yang majemuk, setapak berkelok dengan tanjakan dan turunan terjal serta percabangan yang tak terduga. Tak cukup tekad dan keberanian yang dibutuhkan, namun juga tujuan serta panduan arah agar kita tidak sesat dan berputar-putar dalam lingkaran yang tak berkesudahan. *There ain't no point in moving on, until you've got somewhere to go.*⁸

Kurawal menyadari bahwa organisasi masyarakat sipil di Indonesia menghadapi tantangan yang sama. Setelah Reformasi, organisasi masyarakat sipil menjadi aktor penting dalam upaya menjaga demokrasi, terlibat dalam arena perubahan kebijakan

sembari memobilisasi tekanan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan. Namun semenjak Jokowi berkuasa, organisasi masyarakat sipil tercerai-berai dan kehilangan arah. Sebagian dari mereka dihisap masuk dalam struktur kekuasaan; sebagian lainnya memilih menjadi kacung setia dengan berbagai imbalan *privilege* politik serta kompensasi finansial. Sementara itu, yang memilih untuk tetap kritis di luar istana tak henti dihantam represi dan kriminalisasi. Politik pecah belah ini melemahkan masyarakat sipil, membuat mereka kehilangan legitimasi moral di hadapan warga serta akses untuk mempengaruhi arah kebijakan negara. Jokowi meminggirkan pengaruh organisasi masyarakat sipil dengan menciptakan barisan kelompok relawan militan yang gaduh bersuara untuk mendominasi percakapan publik bagi keuntungan rezim.

Tabel 1.

KELOMPOK RELAWAN UTAMA YANG MENDUKUNG JOKOWI⁹

| Nama | Jaringan | Latar Belakang | Alasan Mendukung | Bentuk Dukungan |
|---|---|--|---|--|
| BARA JP (Didirikan 15 Juni 2013) | 34 provinsi, 67 negara | Aktivis dari berbagai latar: profesional, jurnalis, aktivis pekerja, musisi, dll | <ul style="list-style-type: none"> Krisis kepercayaan terhadap elit politik Berharap perubahan politik Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan 15 juta tanda tangan untuk PDI-P mencalonkan Jokowi Menggerakkan 500 saksi pada hari pemungutan suara |
| SEKNAS JOKOWI (Didirikan 15 Des 2013) | 30 provinsi, 267 kabupaten, 2000 anggota, beberapa organisasi sayap | Aktivis masyarakat sipil dan demokrasi dari berbagai LSM | <ul style="list-style-type: none"> Mendukung Jokowi sebagai calon presiden Menjaga demokrasi Indonesia dan agenda reformasi demokrasi | <ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan lomba poster nasional Merumuskan agenda dan platform kampanye Nawacita Mendesain kampanye untuk kelompok pemuda dan perempuan |
| PROJO (Didirikan 23 Des 2014) | 34 provinsi, 497 kabupaten/kota | Aktivis mahasiswa era 1980-an, anggota PDI-P dan aktivis partai | <ul style="list-style-type: none"> Mendukung Jokowi sebagai calon presiden Mempengaruhi PDI-P untuk mencalonkan Jokowi | <ul style="list-style-type: none"> Menggerakkan 500 saksi pada hari pemungutan suara Menyediakan atribut kampanye |
| ALMISBAT (Didirikan 4 April 2014) | 40 kabupaten di 7 provinsi | Aktivis mahasiswa Gerakan Reformasi 1998, anggota PDIP dan aktivis partai | <ul style="list-style-type: none"> Menolak kebangkitan Prabowo dan Orde Baru Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | Mendesain kampanye untuk kelompok pemuda dan mahasiswa |
| DUTA JOKOWI (Didirikan 10 Juni 2014) | 33 provinsi | Aktivis mahasiswa 1999, musisi, aktivis Kristen dari KWI | Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>canvassing</i> politik di 100 kota Memperluas kegiatan wilayah melalui jejaring dengan berbagai organisasi |
| POSPERA (Didirikan 30 April 2014) | 23 provinsi, 277 kabupaten/kota, 2000 relawan | Aktivis mahasiswa Gerakan Reformasi 1998 | Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>canvassing</i> politik Memperluas kegiatan wilayah di seluruh Indonesia Membagikan atribut kampanye kepada pemilih |

⁸ George Michael, lirik lagu *Waiting (Reprise)*, dari Album *Listen Without Prejudice Vol. 1*. 1990.

⁹ Hurriyah, "The Myth of Civil Society's Democratic Role: Volunteerism and Indonesian Democracy," *The Public Sphere and Political Participation* 4, No. 15, (2019), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=politik>



| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| KAWAN JOKOWI (Didirikan 13 Mei 2014) | 22 provinsi | Aktivis dari berbagai latar: profesional, musisi, aktivis sosial, dll | Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | <ul style="list-style-type: none"> Meluncurkan situs web untuk merekrut relawan (bekerja sama dengan Barisan Muda JK) Mendesain kampanye untuk kelompok pemuda melalui media sosial dan YouTube |
| ARM (Didirikan 8 Maret 2014) | Beberapa serikat pekerja | Aktivis pekerja dan jaringan | Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | <ul style="list-style-type: none"> Menggerakkan dukungan dari kalangan pekerja Mengembangkan jaringan dengan berbagai organisasi pekerja nasional dan lokal |
| KMB untuk JKW-JK (Didirikan 28 Mei 2014) | 34 provinsi, 300 kabupaten | Komunitas bisnis | Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | Menggerakkan dukungan komunitas bisnis untuk Jokowi-Kalla |
| JASMEV 2014 (Didirikan 12 Agustus 2012, diaktifkan kembali 2014) | 31 koordinator regional (di kota besar dan beberapa luar negeri); 1000 anggota | Profesional, aktivis media sosial | Mendukung Jokowi sebagai calon presiden | Kampanye untuk Jokowi melalui media sosial |

Ironisnya, sebagian dari organisasi masyarakat sipil memilih untuk menjadi burung unta. Mereka menyembunyikan kepala dalam pasir, menolak menyaksikan realita dan terus menerus meyakinkan dirinya bahwa semua masih baik-baik saja; bahwa di negara lain banyak hal yang lebih buruk terjadi. Seperti halnya warga yang tersihir dunia Dora, mereka tak punya nyali untuk meninggalkan ilusi. Mereka berpuas diri dengan perubahan-perubahan kecil dari belas kasihan rezim tanpa pernah menuntut perubahan struktur dan keseimbangan kuasa. Karena mereka tahu, membangun strategi gerakan masyarakat sipil tidaklah mudah, tidak cukup hanya dengan kesadaran, semangat, dan niat baik.

Kita butuh peta, butuh bahasa yang dipahami bersama. Sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman dalam keajegan gelembung kecil mereka. Gelembung yang harus dipecahkan untuk meretas perjalanan baru ke depan.

Hal yang sama dilakukan Luffy ketika ia tiba di *Orange Town*. Keadaan yang mendesak akhirnya mendorong Luffy dan Zoro untuk bersekutu dengan Nami, seorang pencuri dan navigator ulung, untuk menghadapi Bajak Laut Buggy "si Badut", yang kelak menjadi salah satu anggota *Shichibukai*. Pertarungan itu bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal merebut sesuatu yang jauh lebih penting: peta menuju *Grand Line*.

Bagi siapa pun yang bermimpi menembus *Grand Line* dan mengejar harta karun Gol D. Roger, peta itu adalah panduan utama. Tanpa peta, siapapun yang hendak berlayar ke *Grand Line* akan tersesat ke dalam pusaran samudra yang tak bertepi. Karena itulah, pertarungan dengan Buggy dan kelompoknya menjadi begitu krusial.

Membangun strategi gerakan masyarakat sipil tidaklah mudah, tidak cukup hanya dengan kesadaran, semangat, dan niat baik.

Walaupun, Luffy dan Zoro punya kekuatan besar, peta hanya bisa direbut berkat kecerdikan Nami. Dialah yang mampu membaca situasi, mendekati Buggy untuk mendapatkan kepercayaan, hingga menemukan celah untuk mencuri peta dari tangannya. Ia pula yang membantu Luffy melumpuhkan Buggy—yang tubuhnya bisa terpisah menjadi potongan kecil—dengan cara mengikat bagian-bagiannya, membuatnya tak lagi mampu menyerang. Keberhasilan itu membuktikan bahwa tekad dan kekuatan harus berpadu dengan strategi dan kecerdikan.

Berbeda dengan Luffy yang mendapatkan petanya dengan menerobos markas bajak laut, Kurawal "mencuri" peta tersebut dengan menghimpun suara akar rumput melalui survei persepsi warga atas demokrasi dan kajian terhadap gerakan masyarakat sipil paska Reformasi bekerja bersama *Asia Research*



Center – Universitas Indonesia (ARC UI), *Research Center for Politics and Government* – Universitas Gajah Mada (POLGOV UGM), dan *Communication for Change* (C4C). Suara akar rumput adalah peta penting untuk menakar seberapa dekat kerja-kerja yang dilakukan masyarakat sipil beririsan dengan persepsi warga atas demokrasi yang mereka hidupi sehari-hari. Suara ini juga menjadi batu penjur untuk dengan jujur mengukur seberapa jauh masyarakat sipil telah menapaki perjalanannya untuk menjaga demokrasi dari kemunduran yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir.

Hasilnya memperlihatkan jurang lebar terbentang antara jargon konsolidasi demokrasi yang sering digaungkan di ruang-ruang aktivisme organisasi masyarakat sipil dengan harapan warga terhadap demokrasi yang dipandu oleh kenyataan hidup mereka. Kata-kata kita seringkali melayang, tak mendarat. Asing. Seperti bahasa dari planet lain. Ironisnya, kita terus mengulang-ulang bahasa itu, seolah semua orang akan mengerti hanya karena kita menganggapnya penting. Sebuah upaya kolektif

untuk memahami kembali apa yang dimaksud warga ketika mereka bilang mereka mendukung “demokrasi” menjadi penting karena ternyata warga memaknainya dengan pemahaman yang berbeda.

Seperti yang disampaikan oleh C4C, sebagai berikut: *“Kalau orang Indonesia bilang dia mendukung demokrasi—yang dia dukung tuh apa sih?”*¹⁰ Pernyataan itu adalah koreksi tajam terhadap pendekatan aktivisme yang sering merasa dirinya sudah benar dan lupa mengeja ulang dunia sesuai logika warganya sendiri dalam konteks hari ini. Banyak aktivis dan organisasi masyarakat sipil (OMS) berbicara dengan bahasa hak dan demokrasi prosedural, tapi masyarakat hidup dalam kosakata yang sangat berbeda. Misalnya, dalam satu eksperimen, C4C mencoba mengganti istilah “hak” dengan “jatah”. Dan hasilnya, ternyata lebih dapat dimengerti bersama. Lebih *nyambung*. Karena “jatah” adalah kata yang bersumber dari rasa keseharian, bukan dari buku teks: *“Masyarakat enggak hidup dalam bahasa ‘hak asasi’. Tapi mereka paham kalau mereka merasa enggak dapat jatah. Nah, itu titik masuknya.”*¹¹



Presiden Joko Widodo menyapa peserta pada puncak acara Musyawarah Rakyat di Jakarta, Minggu (14/5/2023).

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

¹⁰ Wawancara dengan narasumber dari *Communication for Change* (C4C)

¹¹ Wawancara dengan C4C



Dan titik masuk ini juga menjungkirbalikkan cara kita memahami relasi antara elite dan rakyat. Dorongan erosi demokrasi memang datang dari elite, tapi bisa meluas karena "dibiarkan" oleh warga. Warga tidak sepenuhnya mengasosiasikan demokrasi dengan nilai-nilai kebebasan liberal individu. Mereka melihat demokrasi sebagai alat untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial ketimbang alat untuk membatasi kuasa negara dan melindungi hak warga. Hal itu tak sepenuhnya bisa dilepaskan dari nilai-nilai konservatif yang diyakini warga, seperti ketaatan pada pemimpin, kesetiaan pada kelompok, serta kemurnian moral. Bagi kebanyakan warga, "pembatasan kebebasan individu" bisa dibenarkan untuk menjaga "stabilitas" dalam kehidupan masyarakat.

Kenyataan ini harus bisa diarusutamakan dalam pandu arah perjalanan masyarakat sipil ke depan.

Kita tidak mungkin merangkul dukungan warga jika kita terus memilih untuk mengabaikan tingkat kesadaran dan pemahaman mereka. Satu-satunya jalan untuk saling menjemba tangan adalah dengan membangun jembatan.

*"Perubahan cuma bisa terjadi lewat dua cara: koersi atau persuasi. Dan kita harus mulai pilih bujuk rayu. Dan yang harus diingat: kita ini sedang bicara dengan orang lain, yang cara pandanganya, pengalamannya, dan bahasanya bisa sangat berbeda dari kita. Dalam komunikasi, bukan mereka yang harus datang ke kita, tapi kitalah yang harus datang ke mereka. Kita yang butuh didengar, jadi kitalah yang mesti berusaha agar mereka mau mendengarkan. Dan itu butuh kerendahan hati. Justru kemampuan untuk mendekat dan membujuk rayu, tanpa menggurui, adalah bentuk paling nyata dari kerendahan hati itu sendiri."*¹²

DEMOKRASI DI MATA WARGA INDONESIA, TEMUAN RISET C4C

Demokrasi berarti ketertiban dan pemimpin kuat.



Bagi banyak warga, demokrasi bukan soal kebebasan individu, melainkan negara yang aman dan berfungsi.

Pandangan warga berakar pada nilai konservatif.



Mereka menjunjung otoritas, kesucian, dan loyalitas lebih tinggi daripada kesetaraan dan kebebasan.

Warga paling percaya pada organisasi keagamaan.



Setelah itu baru LSM dan kelompok sosial, sementara ormas jadi yang paling tidak dipercaya.

Partisipasi warga tinggi saat pemilu, tapi rendah di luar itu.



Mereka aktif mencoblos, tapi hanya sedikit yang bersedia ikut aksi dan menandatangani petisi.

Tiga Wajah Warga Indonesia



32%

Konservatif Otoritarian – pro-stabilitas, pasif politik.



28%

Konservatif Quasi-Demokrat – lebih memahami demokrasi, tapi tetap ragu



40%

Apatis Moral Otoritarian – acuh, jarang terlibat, dan minim kepedulian politik.

Sumber: Ringkasan Temuan Penelitian C4C tentang Makna Demokrasi dan Ruang Sipil di Mata Publik

¹²Wawancara dengan C4C



Pejalan kaki melintas di samping tenda pengunjung rasa yang melakukan aksi simpatik terkait revisi UU TNI di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat (15/4/2025).

Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr.

Organisasi masyarakat sipil harus mulai mempromosikan ide soal *checks and balances*. Tapi, tentu bukan dengan cara yang dogmatik. Kita harus mampu merasakan kegelisahan warga dan mengajak mereka untuk membayangkan: *"Hai, coba bayangkan kalau negara kamu seperti ini..."*. Dan mungkin, dalam dunia yang jenuh dengan retorika ide progresif dan trauma atas pengkhianatan politisi, imajinasi seperti inilah yang kita butuhkan. Imajinasi yang membujuk, bukan mendikte. Yang saling sambung-menyambung bahasa. Yang mengakui bahwa demokrasi bukan slogan, tapi rasa: apakah aku aman? Apakah aku dihargai? Apa saja sebetulnya jatahku sebagai warga? Di tengah masyarakat yang memiliki cerita dan tradisi komunikasi masing-masing, mungkin demokrasi bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar sampai ke gumam dan cerita keseharian.

Warga selalu punya cerita sendiri. Dan cerita itu tak bisa diseragamkan. Penelitian dari POLGOV UGM dan

ARC UI, juga hasil observasi langsung, menunjukkan bahwa masyarakat bergerak dengan caranya sendiri. Dari kelompok non-institusional, kolektif muda, sampai inisiatif warga. Mereka menjalar, tak selalu rapi, tapi hidup. Dan hidup itu tak bisa dimasukkan begitu saja ke dalam template lama milik organisasi formal masyarakat sipil, seperti organisasi non pemerintah (ORNOP) atau organisasi massa (Ormas) Riset POLGOV UGM dan ARC UI, menyebut bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran besar dalam lanskap masyarakat sipil Indonesia: dari yang terlembaga dan tersentralisasi menjadi yang rimpang, menyebar, dan fleksibel. Ia menyebutnya sebagai gerakan rizomatik—non-hierarkis, melintang, dan tidak mudah ditangkap oleh lensa-lensa lama.

"Yang kita lihat sekarang itu bukan kematian gerakan, tapi transformasi. Bukan berarti enggak ada perlawanan, tapi bentuknya berubah. Dia muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih lokal, lebih cair, dan lebih susah diukur pakai alat ukur lama,"¹³

¹³ Wawancara dengan narasumber dari POLGOV UGM



Inilah kenapa banyak gerakan yang muncul seperti jamur di musim hujan. Mereka muncul dari keresahan, tumbuh dari obrolan *WhatsApp*, muncul dari meme, dari kejengkelan terhadap kenaikan pajak motor, dari penolakan tambang, dari dandang yang tidak lagi *ngebul*. Mereka mungkin tidak punya logo, sekretariat, dan proposal kegiatan. Tapi mereka punya ikatan. Dan dalam zaman seperti ini, ikatan lebih penting dari struktur.

Riset tersebut juga menemukan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, organisasi formal cenderung terjebak dalam teknokratisasi masyarakat sipil.

Organisasi-organisasi tersebut beroperasi dengan sistem yang semakin profesional, tetapi justru menjauh dari kebutuhan masyarakat. Banyak dari kita sibuk mengejar laporan untuk donor ketimbang menjawab keresahan masyarakat. Kebutuhan akan profesionalisme adalah hal yang bagus dan acap tak terhindarkan. Namun, kalau itu bukanlah pembenaran untuk membuat kita sibuk dengan diri sendiri dan melupakan dampak aktivisme kita kepada warga.

Kita tidak sedang bicara baik atau buruk. Kita sedang bicara relevansi.

OMS INDONESIA DI PERSIMPANGAN: TEKNISASI, FRAGMENTASI, DAN ENERGI BARU DARI GENERASI MUDA

Hampir tiga dekade setelah Reformasi, organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia mengalami stagnasi dan kerentanan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Jumlahnya memang banyak, tapi perannya justru makin mengecil. Misalnya, pada Pemilu 2024, OMS tidak mampu menyusun strategi bersama untuk menghadapi naiknya Prabowo Subianto ke kursi presiden. Dari riset ARC UI dan Polgov UGM, ada sejumlah temuan penting mengenai mengenai dinamika OMS di Indonesia.



Keragaman OMS – Ada dua tipe besar: yang terlembaga (punya struktur, staf, dan program rutin) dan yang berbasis akar rumput (lebih spontan, sering menggerakkan massa). Keduanya berjalan dengan logika kerja yang berbeda dan jarang saling terhubung.



Pengaruh politik yang menurun – OMS semakin sulit memengaruhi isu-isu besar yang bersinggungan dengan kepentingan oligarki, seperti tambang, sawit, dan tanah. Sebaliknya, di isu yang dianggap tidak mengancam, seperti kesetaraan gender dan disabilitas, mereka justru berhasil mendorong kemajuan.



Ruang politik baru di kalangan muda – Orang muda banyak membentuk kolektif non-formal yang bergerak di berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia sampai hak buruh. Ini membuka ruang politik alternatif di luar OMS yang mapan.



Muncul generasi baru aktivis – Kehadiran mereka, termasuk para pelajar SMK yang turun ke jalan dalam berbagai aksi, menunjukkan potensi lahirnya tenaga baru untuk memperbarui gerakan demokrasi ke depan.



Aktivisme anak muda yang "rizomatik" – Gerakan mereka tidak terpusat, berbentuk jaringan, beragam, dan bisa dengan cepat meluas lewat media sosial. Pola ini berbeda dengan organisasi tradisional yang hierarkis.

ARC UI dan Polgov UGM menyimpulkan bahwa keberlanjutan OMS akan bergantung pada kemampuannya menjembatani penguatan kelembagaan dengan keterhubungan ke basis sosial, khususnya generasi muda. Tanpa koneksi yang hidup dengan akar rumput, OMS berisiko terjebak dalam rutinitas teknokratis semata. Sebaliknya, jika mampu merawat hubungan dengan masyarakat dan mengintegrasikan energi politik anak muda, OMS dapat kembali menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia.



Sepadan dengan temuan dan percobaan C4C, POLGOV UGM dan ARC UI juga menemukan bahwa gerakan yang dibutuhkan sekarang bukan gerakan yang selalu rapi, tapi gerakan yang bisa didengar dan menjangkau warga biasa. Yang bisa membuat orang merasa tidak sendirian. Dan itu tidak selalu muncul dari lembaga formal. Kadang malah muncul dari kolektif kecil, pekerja serabutan, dari obrolan antar tetangga, dari ruang-ruang kecil yang justru paling jujur. Sebagian dari mereka menemukan cara untuk berkelit dari dominasi donor dan organisasi masyarakat sipil yang formal. Mereka menjalankan “jalan tikus”—strategi bawah tanah untuk tetap melayani warga, sambil berpura-pura tunduk pada prosedur administrasi donor. Tapi tidak semua bisa begitu. Banyak juga yang tumbang. Bahkan, menurut POLGOV UGM, jumlah organisasi formal tersebut sekarang tinggal tersisa 10% dari masa jayanya. Dan ketika yang formal makin tertekan, yang informal justru tumbuh.

Gerakan-gerakan ini tidak menunggu momentum besar. Mereka tidak bergantung pada satu pemimpin, satu tokoh, atau satu isu nasional. Mereka bergerak karena apa yang mereka alami. Mereka tahu bahwa melawan tidak selalu harus spektakuler. Jangan-jangan, selama ini kita terlalu terpaku pada definisi

perubahan yang besar—ganti rezim, ganti presiden. Padahal perubahan juga bisa muncul dari hal-hal kecil yang lokal. Demokrasi yang muncul justru dari jaringan-jaringan interlokal yang perlahan menemukan *common ground*. Seperti Luffy dan kawan-kawan yang tidak membawa satu strategi untuk semua persoalan di setiap episode, kita pun tidak bisa membawa satu model gerakan untuk semua konteks. Dan mungkin hari ini bukan waktunya bertanya, “Apa yang bisa kita ubah?” Tapi justru, “Siapa yang masih mau berjalan bersama kita?”

Dalam arah baru, banyak hal lama yang harus rela untuk kita tinggalkan. Tidak semua kawan perjalanan akan terus bisa berdampingan ke depan. Tetapi, seperti Luffy, Zoro, dan Nami yang akhirnya memilih untuk tetap berlayar bersama meski datang dari latar dan luka yang berbeda, kita pun perlu menumbuhkan keberanian untuk percaya pada ikatan-ikatan baru. Ikatan yang cair namun punya daya lenting yang baik, yang memberi ruang untuk bertumbuh di tengah besarnya gelombang perubahan. Karena yang paling menentukan bukanlah siapa kaptennya atau seberapa besar kapal yang kita naiki, melainkan siapa yang bersedia ikut berlayar, siapa yang menjaga layar tetap terkembang, dan siapa yang berani mengarungi badai hingga akhir tujuan.



Peserta aksi mengibarkan bendera Jolly Roger ala One Piece saat demonstrasi di dekat Gedung DPR, 25 Agustus 2025. Mereka menolak kenaikan tunjangan anggota DPR.

Foto: Agoes Rudianto



TEGAKNYA PANJI TOPI JERAMI



”

**WHAT GOOD IS
THE TREASURE
IF I'M ALONE?**

– Nami

Sejumlah mahasiswa yang bergabung dalam BEM SI melakukan teatrikal saat aksi "Indonesia Gelap" di Jakarta (20/2/2025).

Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU.



3.1. RANCANG-AKSI: Menemukan “Log Pose” untuk Gerakan

Dalam cerita *One Piece*, *Grand Line* adalah jalur pelayaran utama bagi para bajak laut yang mencari harta karun peninggalan Raja Bajak Laut Gol D. Roger. Yang membuat lautan ini berbahaya bukan hanya karena ada banyak bajak laut kuat dari berbagai penjuru dunia. Ia memiliki arus laut yang kacau, kondisi cuaca yang tak bisa diprediksi, badai yang tak terduga, dan monster laut yang mematikan. Medan magnet di sana juga tidak stabil dan bisa berubah secara konstan, bahkan terkadang sangat kuat dan dapat menyebabkan masalah bagi kapal dan kru.

Memasuki *Grand Line*, kru Topi Jerami tak bisa hanya mengandalkan peta dan kapal yang gesit. Mereka membutuhkan *log pose*, sebuah kompas khusus karena yang konvensional tak bisa diandalkan untuk menuntun pelayaran di sana. *Log pose* bekerja dengan cara merekam gelombang

magnet unik dari setiap pulau dan mengarahkan jarumnya ke pulau berikutnya. Tanpanya, mereka tidak akan bisa menentukan pulau mana yang akan dituju, sehingga sangat mungkin akan terdampar di tengah laut yang berbahaya.

Luffy awalnya mendapatkan *log pose* secara cuma-cuma. Dua orang anggota sindikat kriminal *The Baroque Works*, Mr. 9 dan Miss. Wednesday, tak sengaja meninggalkannya di kapal *Going Merry*, tapi kompas itu rusak setelah Luffy dan Sanji—koki Bajak Laut Topi Jerami—terlibat pertengkaran. Luffy dan kawan-kawan akhirnya menerima *log pose* baru dari Crocus—penjaga sekaligus dokter di *Reverse Mountain*, pintu masuk ke *Grand Line*. Crocus memberikannya sebagai tanda terima kasih atas bantuan Luffy karena telah memberikan harapan baru kepada Laboon, paus raksasa yang kesepian, sehingga ia berhenti menyakiti dirinya sendiri.



Sejumlah aktivis membawa payung hitam dan poster gambar korban pelanggaran HAM saat aksi Kamisan ke-842 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Foto: ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/app/aww.



Berbeda dengan kisah Luffy, masyarakat sipil di Indonesia tidak bisa menunggu pemberian atau kemurahan hati pihak lain. *There's no Crocus in our country*. Masyarakat sipil harus merakit sendiri kompasnya. Bagi Kurawal, RANCANG-AKSI adalah upaya untuk membuat *log pose*. Lewat proses ini, Kurawal ingin memastikan bahwa suara akar rumput menjadi pandu arah perjalanan dan acuan bagi gerakan masyarakat sipil untuk menggapai demokrasi yang didambakan.

RANCANG-AKSI adalah sebuah ruang aman bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil—NGO, lembaga donor dan penyalur dana hibah, organisasi media, akademisi, kelompok buruh, dan generasi muda—untuk bertemu, berbagi gagasan, membangun pembelajaran, serta menyusun agenda bersama guna menjawab masalah penyempitan ruang sipil dan kemunduran demokrasi di Indonesia. Proses RANCANG-AKSI dimulai dari lingkaran perbincangan terbatas pada Agustus 2023, kemudian berkembang melalui tiga pertemuan besar: di Bali pada Oktober 2023, Bogor pada Februari 2024, dan Yogyakarta pada Desember 2024. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk menguji gagasan, menyelaraskan strategi, dan memperkuat solidaritas.

Kesadaran yang mendasari seluruh proses ini sederhana namun krusial: ruang sipil yang terbuka, dinamis, dan aman adalah syarat mutlak bagi

pemulihan demokrasi. Namun, sejak rezim Jokowi, ruang itu sedang mengalami penyempitan signifikan. Untuk membalikkan situasi dan memperluas ruang yang ada, masyarakat sipil perlu bergerak bersama sebagai aksi kolektif, membangun gerakan yang terkonsolidasi yang mampu menjembatani perbedaan serta fragmentasi yang selama ini melemahkan soliditas mereka. Tidak ada solusi instan atau “obat ajaib”; proses ini adalah perjalanan panjang. Kapal bagi masyarakat sipil hanya bisa berlayar jika semua komponennya dirakit dengan cermat, langkah demi langkah, sambil terus belajar dan menyesuaikan diri dengan gelombang tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan.

Dalam konteks pasca Pilpres 2024, RANCANG-AKSI juga menyadari bahwa ketidakmampuan masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses yang terjadi salah satunya disebabkan oleh tidak adanya narasi yang utuh dan efektif untuk meringkai beragam pesan yang disampaikan. Pesan-pesan tersebut tercerai berai, sangat bersifat sektoral, tidak beresonansi dengan persepsi dan kebutuhan warga sehingga mudah dilibas oleh narasi yang dihasilkan mesin politik rezim untuk memenangkan kandidat tertentu dengan segala cara. Absennya aktor dalam kelompok masyarakat sipil yang bekerja untuk menghubungkan dan merajut pesan-pesan tersebut menjadi titik lemah dalam kontestasi politik 2024.

KEBUTUHAN KUNCI **PEMULIHAN DEMOKRASI** YANG TERIDENTIFIKASI DALAM RANCANG-AKSI



Membangun visi jangka panjang (untuk masyarakat sipil yang tangguh) sebagai narasi tanding terhadap narasi dominan yang dikembangkan oleh negara



Memperkuat dan memperluas kolaborasi organik antara berbagai komponen masyarakat sipil (e.g. NGO, kelompok muda, akademisi, media) yang tersebar secara luas melalui berbagai titik aktivisme warga di tingkat lokal (kabupaten/kota) dengan dukungan kuat dan partisipasi aktif kelompok orang muda



Menyalurkan dan mendistribusikan lebih banyak sumber daya (finansial maupun non-finansial) ke tingkat lokal secara langsung sehingga beragam sumber daya tersebut tersedia dan bisa diakses oleh aktor-aktor lokal tanpa tergantung dengan aktor-aktor di tingkat nasional



Anies Baswedan (kanan) dan Ganjar Pranowo (tengah) saat menghadiri diskusi "Menegakkan Hukum untuk Kepastian Hukum dan Keadilan" di Rakernas Ikatan Advokat Indonesia (29/11/2024).

Foto: Media sosial Anies Baswedan.

Saat putaran RANCANG-AKSI berlangsung di Sentul, percakapan berkembang pada satu kesimpulan utama: masyarakat sipil hanya bisa memperluas ruang demokrasi jika mampu berkonsolidasi dan memperkuat ruang kolaborasi untuk aksi bersama. Dari sana muncul beberapa kesepahaman penting. Pertama, perlunya membangun narasi bersama yang bisa menyatukan kerja-kerja lintas isu dalam melawan penyempitan ruang sipil. Kedua, memastikan narasi itu betul-betul dekat dengan aspirasi dan kebutuhan warga, sehingga aktivisme masyarakat sipil tidak terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketiga, pentingnya mendukung aktor-aktor yang bisa menjadi "jembatan" untuk konsolidasi dan penganyaman narasi, agar gagasan dan komunikasi antar-segmen gerakan lebih menyatu. Dan keempat, kebutuhan untuk menyiapkan infrastruktur perlindungan dan perawatan bagi masyarakat sipil itu sendiri.

Dalam putaran percakapan terakhir RANCANG-AKSI di Yogyakarta, kelompok masyarakat sipil yang hadir menegaskan komitmen untuk mengubah pola konsolidasi yang selama ini lebih bersifat "transaksional" menjadi "transformasional". Konsolidasi masyarakat sipil tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif dan tergantung momentum eksternal. Ia tak bisa lagi dibangun sekadar untuk melayani kepentingan jangka pendek, atau hanya bersifat

mobilisasi massa tanpa diikuti oleh intervensi pengorganisasian yang sistematis. Pola lama itu juga sering terputus dari warga serta minim ruang untuk evaluasi dan pembelajaran kolektif. Konsolidasi yang transformatif harus berlandaskan visi jangka panjang dan tujuan bersama gerakan. Ia perlu mendapat dukungan secara luas dari massa sebagai konstituen langsung, yang terus menerus dirawat melalui proses pendidikan politik kewargaan dan pengorganisasian yang konsisten. Di saat yang sama, konsolidasi transformatif juga penting dilengkapi dengan agensi politik yang berperan sebagai alat tawar-menawar dengan aktor-aktor di arena politik sehingga perubahan struktural dalam relasi kuasa dapat didorong secara efektif.

Dalam pertemuan tersebut, gerakan masyarakat sipil juga berhasil merakit visi jangka panjang, yang berbunyi:

"Pada 2045, tercipta masyarakat sipil yang kuat dan tangguh untuk memastikan sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan yang merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat, pemerintahan yang menjalankan praktik demokrasi secara substantif, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip supremasi sipil serta bebas dari praktik korupsi, dan menerapkan ekonomi yang berkeadilan."



Seperti *log pose* yang memandu pelayaran kru Topi Jerami, visi ini menjadi kompas non-konvensional bagi gerakan masyarakat sipil dalam menghadapi rezim Prabowo-Gibran, di mana ruang sipil kian sempit, peran militer tambah besar, politisasi aparat keamanan terus menguat, dan sikap pemerintah yang semakin otoriter dan anti-kritik. Visi ini memberikan arah yang jelas, membantu gerakan masyarakat sipil agar tidak akan terombang-ambing oleh tekanan penguasa atau terpecah oleh kepentingan sektoral.

Visi 2045 hadir sebagai kompas non-konvensional bagi gerakan masyarakat sipil dalam menghadapi rezim Prabowo-Gibran. Bedanya, *log pose* milik masyarakat sipil ini tidak otomatis bekerja seperti di dunia *One Piece*. Perairan demokrasi Indonesia jauh lebih bergolak: penguasa yang semakin anti-kritik, militer yang merangsek ke ranah sipil, aparat keamanan yang dipolitisasi, serta intoleransi yang terus dipupuk dari atas. Karena itu, *log pose* masyarakat sipil ini dirakit dengan bahan-bahan utama yang kokoh dan berkualitas. Bahan itu antara lain: sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan; pembatalan undang-undang yang mengekang kebebasan sipil; partai politik yang sungguh mewakili rakyat; sistem peradilan yang menghukum pelanggaran HAM dan koruptor; perlindungan bagi



Meskipun kita semua bergerak secara independen, keberhasilan gerakan hanya mungkin terwujud jika ada rasa saling percaya, bahwa setiap pihak akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan visi bersama.



FONDASI UNTUK VISI MASYARAKAT SIPIL 2045



- Sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah tanpa merusak lingkungan dan menghapus dominasi oligarki
- Pembatalan seluruh undang-undang dan regulasi yang menekan kebebasan sipil dan hak-hak warga negara
- Partai politik yang benar-benar mewakili suara rakyat dalam sistem demokrasi negara
- Sistem peradilan yang adil, yang menghukum—bukan melindungi—pelanggar HAM dan koruptor
- Perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas
- Infrastruktur yang kuat untuk sistem keamanan dan perlindungan holistik bagi para aktor gerakan masyarakat sipil
- Solusi politik yang damai untuk Papua
- Kesetaraan gender
- Masyarakat inklusif di mana orang berbagi nilai bersama, memiliki hubungan sosial yang positif, dan bekerja sama demi kesejahteraan seluruh anggota masyarakat



kelompok minoritas; infrastruktur keamanan bagi gerakan sipil; solusi politik damai untuk Papua; kesetaraan gender; serta masyarakat inklusif yang menumbuhkan nilai bersama. Tanpa semua itu, *log pose* masyarakat sipil tidak akan berfungsi, jarumnya hanya akan berputar-putar tanpa arah, membiarkan gerakan terombang-ambing oleh tekanan penguasa atau tercerai-berai oleh kepentingan sektoral.

Namun, terlepas dari visi 2045, terwujudnya demokrasi yang didambakan tetap bergantung dari bagaimana setiap elemen masyarakat sipil—dari NGO, organisasi donor dan penyalur dana hibah, akademisi, media, hingga kelompok orang

muda—menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan Zoro kepada Chopper: *“You do what you can, the best that you can, and then you turn to the others and expect the same from them.”* Meskipun kita semua bergerak secara independen, keberhasilan gerakan hanya mungkin terwujud jika ada rasa saling percaya, bahwa setiap pihak akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan visi bersama. Dengan semangat itu, visi 2045 bisa menjadi kompas nyata yang menuntun kita menavigasi badai politik, memperkuat ruang demokrasi, dan bergerak bersama menuju Indonesia yang adil, transparan, dan benar-benar responsif bagi rakyatnya.



Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (26/12/2024). Dalam aksinya, mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen karena dianggap menyengsarakan rakyat.

(foto ini diedit dengan AI, tanpa mengubah esensi)
Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU.



3.2. Persekutuan dengan Media Lokal – Semua Pelayaran Butuh Nico Robin

Perjalanan memulihkan demokrasi bukanlah kerja perorangan. Beban beratnya tidak mungkin dipikul sendirian. Perkelahian yang dilalui untuk merebut kembali ruang-ruang yang telah dirampas oligarki adalah upaya kolektif warga bersama masyarakat sipil, di mana peran dibagi serta resiko didistribusikan untuk dapat bertahan dalam perlawanan yang panjang serta berakhir dalam kemenangan,

*"No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main"¹⁴*

Dalam perjalanan menuju *Grand Line*, Luffy sejak awal tahu pentingnya sekutu. Kru Topi Jerami terbentuk oleh kesadaran bahwa tak mungkin menaklukkan *Grand Line* seorang diri. Sejak

pelayaran pertamanya saat meninggalkan *Pulau Foosha* di *East Blue*, ia mencari kru yang bukan cuma punya kekuatan dan keahlian bertarung, tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan penindasan, yang gigih dan keras kepala pada impiannya—seperti Zoro yang ingin jadi pendekar pedang terkuat, Nami yang bermimpi menggambar peta dunia, Usopp yang berangan-angan menjadi ksatria laut pemberani, dan Sanji yang berhasrat menemukan *All Blue*, laut legendaris tempat seluruh samudra bertemu, surga bagi seorang juru masak. Meski cita-cita mereka berbeda, mereka memilih berlayar dalam satu kapal sambil menapaki jalan masing-masing untuk mewujudkan impian pribadi. Mereka tak sadar, tapi mereka memilih menjadi keluarga. Dan itulah yang membuat mereka tangguh—karena persatuan itu lahir dari pilihan, bukan paksaan.



Alat berat menghancurkan rumah-rumah warga untuk memuluskan proyek rumah deret di RW 11 Tamansari, Kota Bandung.

Foto: BandungBergerak/
Prima Mulia.

¹⁴ "No man is an island" is a phrase that comes from a poem by the English poet John Donne, titled "Meditation XVII". The poem was published in 1624 as part of Donne's collection of essays and meditations, "Devotions upon Emergent Occasions". The poem explores the theme of interconnectedness and the shared experience of humanity



Luffy pun sadar, kru bukan hanya soal tekad atau keberanian, tapi juga kemampuan untuk saling melengkapi. Sebagai contoh, saat Nami jatuh sakit, mereka baru merasakan betapa pentingnya ketiadaan seorang dokter. Maka ketika bertemu Chopper—seekor rusa hidung biru yang bisa bicara—di *Drum Island*, kru Topi Jerami mengajaknya bergabung. Chopper sempat menolak, terikat traumanya dengan manusia. Tapi setelah melihat kegigihan Luffy mengalahkan Wapol—seorang tiran yang menindas para dokter di *Drum Island*, ia sadar: inilah jalan untuknya bertualang dan menjadi dokter yang bisa menyembuhkan semua penyakit di dunia.

Pelayaran Kurawal dalam kapal gerakan masyarakat sipil tidak jauh berbeda. Untuk menavigasi samudera penuh badai di rezim yang makin otoriter, butuh “kru” yang punya kecakapan untuk saling mengisi dengan peran yang beragam. Saat istana kian mapan dengan tembok yang terasa tak tergugat, kita perlu darah baru, sekutu yang bisa menawarkan pendekatan berbeda, mereka yang datang dengan alternatif untuk membuka kebuntuan dan mengikis kejumudan cara pandang.

Bagi Kurawal, media lokal yang selama ini konsisten menyuarakan perjuangan warga, yang berpihak dan berdiri bersama mereka yang melawan ketidakadilan adalah sekutu yang potensial. Selama ini, media sering ditempatkan—dan menempatkan diri—di luar gerakan. Padahal, apa artinya perlawanan tanpa adanya suara yang berani mengabarkan? Apa gunanya kapal berlayar jika kisahnya lenyap ditelan debur ombak tanpa pernah dicatat secara cermat tentang pertempuran yang dimenangkan, pelabuhan yang disinggahi serta tragedi yang dilalui? Media lokal yang berpihak pada kepentingan publik menjadi penting karena dia sejalan dengan tradisi *social-justice journalism*, yang menolak terjebak dalam mitos objektivitas karena sering gagal mewakili suara kelompok termarjinalkan. Alih-alih terjebak taklid buta untuk menjaga keseimbangan “dua sisi” yang bias pada penindas, jurnalisme yang berpihak pada keadilan sosial memberi ruang bagi mereka yang dipinggirkan, mengungkap ketidakadilan, dan ikut mendorong perubahan sosial.¹⁵ Di sinilah Kurawal memilih langkahnya: menjalin kolaborasi dengan media lokal yang teguh pada mimpinya. Media yang tidak netral, yang tidak berkompromi dengan kekuasaan. Kami memulainya bersama BandungBergerak di Jawa Barat dan Flores di Nusa Tenggara Timur. Keduanya punya, dan telah memainkan, peran penting di wilayahnya,

Jurnalisme yang berpihak pada keadilan sosial memberi ruang bagi mereka yang dipinggirkan, mengungkap ketidakadilan, dan ikut mendorong perubahan sosial.

menghidupkan ruang gerakan yang selama ini tercerai berai, menawarkan cara baru bagi warga untuk saling menemukan dan menyatukan energi.

BandungBergerak bukan hanya sebuah media. Dia adalah representasi dari denyut aktivisme warga Bandung. Sebuah ikatan yang tidak dikungkung oleh batas-batas administratif pemerintahan namun disatukan oleh tautan sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan tak jarang: buhul emosional. BandungBergerak berkomitmen menyajikan cerita dan berita mendalam berbasis data tentang Bandung melalui kerja jurnalistik yang memihak kemanusiaan dengan tiga kata kunci yang akan selalu dihidupi: lokal, data, dan mendalam.

Media sudah selayaknya hadir untuk mengoyak keheningan serta memungkinkan warga untuk menggugat dinamika kuasa yang meminggirkan hak-haknya. BandungBergerak percaya bahwa orang muda penting bukan karena harus menjadi “ujung tombak” yang menanggung sendiri beban perubahan, tapi karena energi, keberanian, dan imajinasi mereka bisa menjaga percakapan demokrasi tetap hidup, selama ada ruang dan medium yang mendukungnya. Ironisnya, orang muda yang tersebar di ratusan institusi pendidikan di Bandung banyak terjebak dalam sistem pendidikan yang mengekang. Kampus

¹⁵ Danielle K. Kilgo, “Social Justice Journalism,” in *The SAGE Encyclopedia of Journalism*, 2nd ed., ed. Gregory A. Borchard (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022), <https://doi.org/10.4135/9781544391199>



lebih mendorong mereka untuk fokus pada tugas akademik, menuntaskan angka-angka, dan mengejar gelar, ketimbang mengasah kepekaan pada persoalan di lapangan. Akibatnya, banyak mahasiswa kehilangan kesempatan untuk melatih berpikir kritis, memahami isu-isu mendasar di sekitarnya, dan menyalurkan suara mereka di ruang publik. Pada saat yang sama, gerakan mahasiswa dan komunitas akar rumput di Bandung berjalan terpisah-pisah, tanpa wadah kolaboratif yang bisa menghubungkan mereka. BandungBergerak hadir untuk membuka ruang dan membangun jembatan.

BandungBergerak merancang inisiatif-inisiatif yang sederhana tapi tajam. Lewat program “Bertandang ke Kampus”, ruang kuliah berubah menjadi tempat berlatih berpikir kritis, berdiskusi, dan menulis. Melalui “Sayembara Esai Mahasiswa Bersuara: #28Hari28Kritik”, mahasiswa dari berbagai daerah mendapat ruang untuk menuangkan kritiknya, yang kemudian dikurasi dan dipublikasikan agar gagasan mereka tidak hilang begitu saja. Dari proses itu lahir buku “Melawan dengan Gagasan”, yang diluncurkan melalui serangkaian diskusi lintas kota, untuk menegaskan bahwa gagasan bisa menjadi alat perlawanan, bukan sekadar tulisan.

Dari situ, percikan kecil mulai menyala. Dan puncaknya adalah sebuah pertemuan besar di teras Dago Elos, tanah yang hendak dicabut paksa. Festival Bandung Menggugat. Mahasiswa dengan kaus oblong duduk di samping ibu-ibu pejuang dapur, bersama akademisi, aktivis, dan warga biasa. Diskusi, pameran foto dan poster penggusuran yang berdiri sejajar dengan mural-mural perlawanan, orasi, hingga pertunjukan seni menjadikan festival ini bukan hanya ruang perlawanan, tapi juga perayaan bahwa demokrasi bisa hidup dalam kebersamaan. Momen ini menunjukkan bagaimana media bisa benar-benar jadi simpul yang mempertemukan fragmen-fragmen gerakan, dan menyalakan api yang sebelumnya padam.

“Situasi politik dan sosial tidak memberi ruang bagi banyak orang untuk memilih yang ideal. Akan selalu sulit membayangkan sesuatu yang benar-benar baru bisa lahir dari kondisi yang buruk. Tapi kami percaya, merawat sikap kritis tetap penting. Meskipun penguasanya berganti-ganti wajah dan gaya, kita tetap bisa bermain di ruang-ruang kecil ini. Sambil menunggu momentum yang lebih besar,” kata BandungBergerak.¹⁶

Impian BandungBergerak sejak awal sebenarnya sederhana dan realistis. Mereka ingin menjadi wadah bagi suara-suara yang tak terwakili, gagasan dari pinggiran, dan narasi yang jarang mendapat ruang di media arus utama. Dari situ, kemampuan dan peran BandungBergerak perlahan berkembang, menjadi penghubung komunitas lintas hobi dan minat, membuka kemungkinan agar perspektif kritis bisa tetap tumbuh di tengah kota yang penuh tekanan dan pemerintah yang gemar bersolek dengan agenda ekskavatorisnya.

“Kita ini sering kali nggak punya alat besar atau kuasa besar, jadi yang bisa dikerjakan ya apa yang ada di depan mata. Dan dengan riwayat kota Bandung, yang punya jejak panjang dalam perlawanan, walaupun kecil, kerja-kerja seperti itu tetap krusial.”¹⁷

Serupa Bandung, lumpuhnya inisiatif kolektif masyarakat sipil juga terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Gerakan di sana mengalami stagnansi. Aktor-aktornya jarang ada yang progresif, mulai dari akademisi, NGO, insitusi keagamaan seperti Gereja, hingga media. Tak jarang mereka justru menjadi pengeras suara bagi kekuasaan—unit usaha plat merah, korporasi rakus, pemerintah daerah—untuk memuluskan kepentingan bisnisnya di penjuru provinsi.



Media bisa memperkuat gerakan dengan ikut menyuarakan yang terpinggirkan, menyambungkan komunitas, dan menyalakan solidaritas.



¹⁶ Wawancara dengan BandungBergerak

¹⁷ Wawancara dengan BandungBergerak



MANIFESTO ASPIRASI WARGI BANDUNG 2029¹⁸

Aspirasi Warga Bandung 2029 adalah dokumen hasil inisiatif partisipatif warga Bandung yang merangkum keresahan dan harapan mereka tentang masa depan kota. Dokumen ini lahir karena banyak masalah perkotaan tak kunjung selesai—mulai dari macet, sampah, infrastruktur rusak, sampai korupsi—sehingga Bandung disebut sedang berjalan dengan mode autopilot. Lewat survei, diskusi, dan kolaborasi antar komunitas yang dikoordinasi oleh Demokrasi Kita, warga merumuskan lima kebutuhan prioritas yang mendesak untuk dipenuhi sebelum 2029. Lima kebutuhan prioritas itu antara lain:



Transportasi Publik

Kota Bandung menghadapi masalah kemacetan serius karena jumlah kendaraan pribadi hampir sama dengan jumlah penduduk. Jika tidak ada terobosan besar, pada 2035 jalan-jalan kota bisa benar-benar lumpuh. Masyarakat pun menuntut transportasi publik yang aman, nyaman, dan dapat menjadi pilihan utama dibanding kendaraan pribadi.



Infrastruktur Layak dan Terawat

Kondisi fasilitas kota masih jauh dari ideal: banyak jalan berlubang, trotoar rusak, dan penerangan yang kurang memadai. Hanya sebagian kecil trotoar yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas, padahal jumlah lansia di Bandung hampir sejuta orang. Warga menginginkan infrastruktur yang adil, ramah bagi semua kelompok, dan terawat secara konsisten.



Reformasi Pengelolaan Sampah

Masalah sampah semakin mendesak karena kapasitas TPA dan armada pengangkut tidak memadai, menyebabkan sampah menumpuk di TPS maupun ruang publik. Kondisi ini bahkan berisiko menimbulkan longsor dan ledakan gas metana. Warga menginginkan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, mulai dari pengurangan, pemilahan di sumber, hingga penggunaan teknologi pengolahan yang lebih aman dan efektif.



Pemerintahan Transparan & Berintegritas

Kasus korupsi yang berulang membuat warga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah kota. Skor integritas Bandung dalam penilaian KPK juga tergolong rendah. Warga menginginkan tata kelola yang transparan, bersih, dan akuntabel sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan publik.



Kerja Layak & Biaya Hidup Terjangkau

Banyak pekerja formal masih bergaji di bawah UMK, sementara pekerja sektor informal makin terhimpit. Angka pengangguran tinggi, biaya hidup terus naik, dan jeratan pinjaman *online* menjadi jalan keluar yang menyakitkan bagi sebagian warga. Karena itu, mereka menuntut pekerjaan yang bermartabat, upah layak, serta harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.

Sumber: *Manifesto Aspirasi Warga Bandung 2029: Jalan Mengubah Kota Autopilot*, BandungBergerak, 2024

¹⁸ Bagas Charli Manuel Purba, "Manifesto Aspirasi Warga Bandung 2029: Jalan Mengubah Kota Autopilot," BandungBergerak, 23 November 2024, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1598379/manifesto-aspirasi-wargi-bandung-2029-jalan-mengubah-kota-autopilot>



Masyarakat adat Poco Leok saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Manggarai pada 5 Juni 2025.

Foto: Floresa.co

Dalam beberapa tahun terakhir, Flores menjadi sasaran pembangunan masif di sektor pariwisata dan energi baru terbarukan, termasuk proyek pembangkit listrik panas bumi. Penetapan Labuan Bajo sebagai Proyek Strategis Nasional Pariwisata, yang dikenal sebagai Bali Baru, membuat wilayah ini menjadi pusat perhatian investor dan titik fokus pembangunan skala besar. Alih-alih membawa kesejahteraan bagi warga, proyek-proyek ini justru dikembangkan dengan mengabaikan hak masyarakat lokal, meminggirkan mereka, dan merusak lingkungan yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari.

Di tengah narasi besar “pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transisi energi” dan gerakan masyarakat sipil yang nyaris tak terdengar, Floresa mengambil sikap. Mereka menolak netral dan enggan menjadi corong kekuasaan.

“Tugas media tidak untuk mengamini klaim-klaim dari korporasi dan berdialog dengan kekuasaan”, kata mereka.¹⁹

Floresa sadar bahwa mereka tumbuh dan berkembang di tengah dinamika Flores dalam

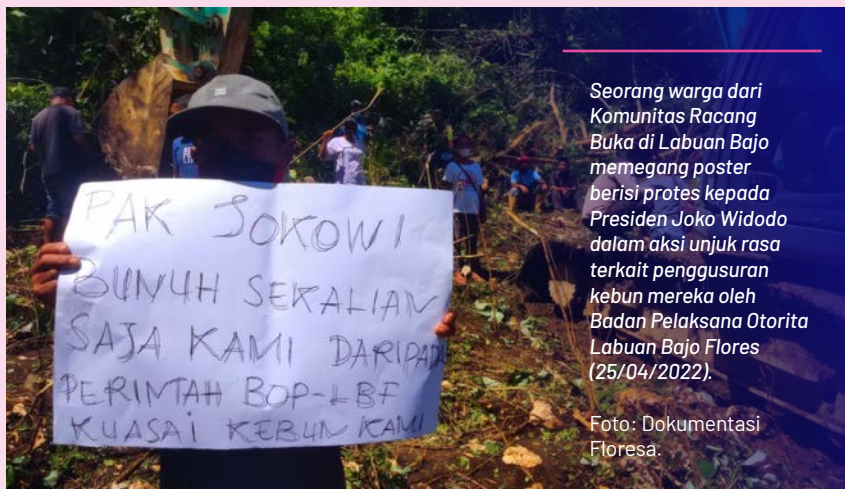
konteks Indonesia pasca-desentralisasi dan sistem pembangunan baru yang menyasar wilayah bagian timur. Sebagai media, mereka menempatkan diri sebagai bagian dari warga dan bukan sebagai agensi yang berjarak dari akar rumput. Pencaplokan sumber daya alam, penyangkalan hak masyarakat adat, pengrusakan hutan dan laut, serta alih fungsi kawasan konservasi menjadi kawasan bisnis pariwisata dan pertambangan adalah perhatian utama Floresa sebagai representasi dari kegelisahan atas marjinalisasi yang dialami warga.

Sementara media lain memproduksi narasi yang memuluskan perampasan ruang hidup warga, Floresa memberi ruang seluas mungkin bagi masyarakat untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri. Dalam situasi pertarungan kekuasaan yang asimetris di Flores, mereka menjadi penyambung lidah bagi mereka yang seringkali diabaikan. Suara yang biasanya tenggelam kini terdengar jelas, memotret realitas sehari-hari yang sering diabaikan. Liputan yang tajam dan berpihak ini bahkan mendapat pengakuan, termasuk *Udin Award* dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan *MAW Talk Award* atas kontribusi positifnya bagi ekosistem media lokal.

¹⁹ Wawancara dengan Floresa



UDIN AWARD 2023 UNTUK FLORESA: LIPUTAN KRITIS YANG MEMIHAK WARGA²⁰



Seorang warga dari Komunitas Racang Buka di Labuan Bajo memegang poster berisi protes kepada Presiden Joko Widodo dalam aksi unjuk rasa terkait pengusuran kebun mereka oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (25/04/2022).

Foto: Dokumentasi Floresia.

Pada Maret 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan di Labuan Bajo di tengah berbagai protes warga. Pembangunan ini dianggap meminggirkan masyarakat lokal karena aspirasi mereka jarang didengar dan banyak yang kehilangan lahan pertanian. Seperti proyek-proyek pemerintah pada umumnya, proses pembangunan jalan ini bersifat *top-down*,

serta lebih mengutamakan kepentingan pariwisata dan korporasi daripada kebutuhan warga. Sebagai media yang selalu berpihak pada warga, Floresia banyak menerbitkan liputan soal proyek ini. Tidak hanya menampilkan fakta pembangunan, liputan mereka juga menyoroti bagaimana proyek dijalankan tanpa melibatkan warga secara substantif, menimbulkan pengusuran, dan dampak ekologis yang merugikan komunitas lokal.

Pasca terbitnya berbagai liputan itu, para jurnalis Floresia diteror oleh pihak yang mengaku aparat TNI, sementara akun media sosial mereka diretas dan situs webnya diserang. Meski mendapat intimidasi, mereka tetap mempertahankan prinsip, dan konsisten dalam menyuarakan kepentingan publik. Berkat keteguhan itu, Floresia meraih Udin Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada 2023. Penghargaan ini menjadi pengakuan sekaligus dukungan bagi media yang berani mempertahankan independensi dan integritas saat menghadapi kekerasan atau intimidasi karena liputan-liputannya yang kritis.

Bagi Floresia, kemenangan ini lebih dari sekadar penghargaan. Tim redaksi memandangnya sebagai dorongan moral untuk terus menjaga integritas, memberi ruang bagi warga, dan memastikan suara mereka terdengar dalam setiap kebijakan dan pembangunan di Flores. Udin Award menjadi simbol bahwa keberanian menulis, berpihak pada masyarakat, dan menegakkan keadilan tetap dihargai, meski dihadapkan pada tekanan dan intimidasi.

Sumber: Udin Award untuk Floresia, Dukungan Moral untuk Terus Berpihak pada Kepentingan Publik, Floresia, 2023

Ingin menjadi bagian dari perjuangan warga, Floresia tidak hanya bekerja dari meja redaksi. Mereka juga membangun ruang nyata untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengorganisir berbagai elemen masyarakat di Labuan Bajo. Inisiatif ini diwujudkan dalam Rumah Kopi Kebun Kota—sebuah kafe, perpustakaan, dan titik pertemuan komunitas yang menjadi pusat orkestrasi jaringan gerakan masyarakat sipil di Flores.

“Rumah Kopi Kebun Kota membuat kami bisa bertemu dengan lebih banyak elemen di Labuan Bajo. Menjadi tempat berkumpul warga sekaligus mitra Floresia di banyak isu. Jadi tempat menginap teman-teman gerakan. Dan jadi titik simpul pertemuan formal dan informal untuk mendiskusikan persoalan publik yang ada di Labuan Bajo.”²¹

²⁰ Tim Floresia, “Udin Award untuk Floresia, Dukungan Moral untuk Terus Berpihak pada Kepentingan Publik,” Floresia.co, 8 Agustus 2023, <https://floresia.co/reportase/mendalam/55544/2023/08/08/udin-award-untuk-floresia-dukungan-moral-untuk-terus-berpihak-pada-kepentingan-publik>

²¹ Wawancara dengan Floresia



Ruang ini lahir dari kolaborasi berbagai komunitas. Beberapa menyumbang bahan dan dekorasi, membuat suasana menjadi hangat dan hidup. Produk lokal juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi di sana: kopi dari petani setempat dijual dengan harga adil, madu dan jahe dikemas warga Pulau Komodo dan Wae Sano, sementara suvenir hasil karya komunitas lokal—patung komodo, sabun organik, hingga aksesoris rohani—tersedia di pojok lain. Ini adalah cara Floresa melawan praktik *ijon* yang masih marak di sana, sekaligus memastikan keuntungan sampai ke tangan komunitas lokal.

Setiap sudut ruang itu, dari kopi yang diseduh, buku yang dibaca, hingga produk yang dijual, menceritakan semangat kolaborasi dan pemberdayaan. Lebih dari sekadar tempat berkumpul, ruang itu menjadi titik nyata di mana solidaritas, kreativitas, dan pergerakan masyarakat berpadu, memperkuat suara warga, dan menegaskan peran media sebagai bagian dari gerakan sosial.

Apa yang dikerjakan BandungBergerak dan Floresa menunjukkan bahwa media bisa melampaui peran tradisionalnya. Mereka bukan hanya menyampaikan berita, tapi memperkuat gerakan dengan keahlian yang khas: menyuarakan yang terpinggirkan, menyambungkan komunitas, sembari menyalakan solidaritas. Kuncinya ada pada keberpihakan yang jelas—kepada warga, bukan kuasa—serta tujuan besar yang sama: Indonesia yang adil bagi semua orang.

Dalam parabel kisah *One Piece*, peran media-media lokal ini tak ubahnya seperti kontribusi Nico Robin dalam pelayaran kru Topi Jerami. Robin adalah satu-satunya yang selamat dari tragedi *Ohara*—sebuah pulau yang dihancurkan *Pemerintah Dunia* hanya karena penduduknya berusaha membaca, merekam, mempelajari sejarah masa lalu yang dihapuskan. Sejak kecil ia hidup dalam pelarian, diburu karena kemampuannya membaca *Poneglyph*, batu kuno yang menyimpan kebenaran tentang *Abad Kekosongan*. Luka itu membuat Robin tumbuh menjadi sosok yang tenang, penuh pengetahuan, tapi di saat yang sama menanggung beban sejarah yang berat. Saat bergabung dengan kru Luffy, Robin tidak hanya ikut bertarung. Ia membawa sesuatu yang lebih penting: kemampuan untuk menjaga ingatan, menghubungkan masa lalu dengan masa depan, dan memberi arah pada perjalanan mereka. Tanpa pemahaman sejarah yang dibawanya, kru Topi Jerami tak akan mampu menghadapi kekejaman *Pemerintah Dunia* secara utuh, karena mereka tidak mengerti bagaimana kekuasaan itu terbentuk dan kebusukan apa yang mereka coba tutupi.



Media bisa menjadi penjaga ingatan, penerjemah luka, dan penghubung antar-generasi yang memastikan perjuangan warga tidak berhenti di satu momen, tapi terus hidup sebagai narasi bersama.



Begitu pula dengan media seperti BandungBergerak dan Floresa. Mereka merekam jejak perjuangan warga, menyimpan sejarah kecil yang sering coba dihapus, dan menyuarakannya kembali agar pengalaman serta kebenaran tidak hilang. Mereka adalah penjaga ingatan, penerjemah luka, dan penghubung antar-generasi yang memastikan perjuangan warga tidak berhenti di satu momen, tapi terus hidup sebagai narasi bersama. Tanpa keberadaan mereka, warga kehilangan panduan untuk memahami ketidakadilan yang terjadi, kebijakan yang menutupi kerugian mereka, dan peluang untuk mendorong perubahan nyata.

Di era Prabowo, ketika sensor semakin ketat, disinformasi terorganisir marak, dan teknologi—termasuk kecerdasan buatan—banyak digunakan untuk memperkuat propaganda, keberadaan media *social justice* menjadi semakin krusial. BandungBergerak dan Floresa tidak hanya mencatat fakta; mereka memberi warga pengetahuan untuk memahami ketidakadilan, melawan manipulasi narasi resmi, dan memastikan suara rakyat tetap terdengar. Layaknya Robin bagi kru Topi Jerami, mereka menjadi pengingat sejarah sekaligus penjaga arah, memastikan perjuangan demokrasi di akar rumput terus hidup meski penguasa tak berhenti mencoba membungkamnya.



”

**WE CAN'T AFFORD TO
LOSE THIS BATTLE...
NO MATTER WHAT!**

— Nico Robin



Aktivist Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih mengikuti Aksi Kamisan ke-818 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Aksi yang digelar dalam rangka memperingati 23 tahun tragedi Wasior tersebut menuntut agar pemerintah mewujudkan keadilan di tanah Papua.

Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa.



Kibarkan Bendera, Jelajah Samudera!

Sepuluh tahun terakhir bukan sekadar masa suram bagi gerakan masyarakat sipil. Ini adalah dekade di mana harapan dikooptasi, kritik dijinakkan, dan suara-suara pemberontakan dibungkam dalam pelukan kekuasaan yang tampak progresif tapi sebenarnya manipulatif. Kita menyaksikan sendiri bagaimana janji-janji perubahan dijadikan selimut untuk meninabobokan gerakan. Kita ikut tertidur di dalamnya. Tapi kini, mimpi itu runtuh. Dan di balik reruntuhannya, kita menemukan kenyataan yang telanjang. Sistem ini tak akan menyelamatkan siapa pun kecuali dirinya sendiri.

Sudah waktunya berhenti berharap pada meja perundingan yang kaki-kakinya digergaji sejak awal. Sudah waktunya berhenti mengemis pada institusi yang tak lagi punya urat malu. Ini bukan soal menyerah, tapi soal sadar. Bahwa jalan keluar tidak akan datang dari atas, tapi dari kita yang masih memilih untuk berkumpul di bawah. Dari kawan-kawan yang memilih melawan, bukan karena mereka yakin akan menang, tapi karena mereka tidak tahan hidup di dunia yang penuh ketidakadilan.

Tahun 2024 menegaskan pelajaran itu. Pemilu tidak lagi bisa dijadikan sandaran utama bagi perubahan politik yang bermakna. Proses elektoral justru menyingkap betapa rapuhnya demokrasi formal ketika aturan bisa dimanipulasi, lembaga pengawas abai pada tugasnya, dan rakyat dipaksa memilih dalam ruang yang dikurung dominasi elit. Upaya pemantauan eksternal dan liputan mendalam yang dilakukan sepanjang pemilu memang tak mengubah hasil, tetapi memberi pelajaran yang menunjukkan pentingnya membangun keberanian politik dari akar rumput.

Jika pemilu gagal menjamin perubahan, maka satu-satunya jalan adalah memperkuat kekuatan dari bawah. Kekuatan itu lahir dari pengalaman nyata warga sehari-hari. Bagaimana mereka memaknai demokrasi? Apa yang mereka harapkan? Bahasa apa yang bisa menjembatani gerakan dengan kehidupan mereka? Di tengah dunia yang jenuh dengan retorika progresif dan pahitnya pengkhianatan politisi, warga membutuhkan imajinasi yang membujuk, bukan memerintah; yang merajut komunikasi, bukan memaksakan gagasan. Demokrasi bukan sekadar slogan, melainkan hadir dalam keseharian: "apakah aku merasa aman?", "Apakah suaraku dihargai?", "Apakah hak-hakku diakui?". Di titik ini, demokrasi bukan tentang siapa yang paling

lantang, tapi tentang siapa yang benar-benar mampu mendengar—hingga menangkap bisikan dan kehidupan sehari-hari orang-orang.

Ketika demokrasi dimaknai dari bawah, maka tindakannya pun lahir dari bawah. Tahun 2024 membuktikan: warga bergerak dengan caranya sendiri—sering kecil, berantakan, tanpa hierarki jelas, tetapi berangkat dari ruang yang jujur. Gerakan semacam ini mampu menyentuh warga biasa, membuat mereka merasa terhubung. Mereka tak menunggu momentum besar, tak bergantung pada satu pemimpin, melainkan bertolak dari pengalaman mereka sendiri. Dari jaringan di akar rumput seperti inilah demokrasi bertumbuh, menemukan titik temu, dan membuktikan bahwa perubahan bisa lahir dari hal-hal sederhana dan nyata.



Jalan keluar tidak akan datang dari atas, tapi dari kita yang masih memilih untuk berkumpul di bawah, dari kawan-kawan yang memilih melawan.





Presiden menerima tokoh lintas agama, partai, organisasi pemuda, dan serikat buruh untuk berdialog, 1 September 2025.

Foto: Instagram/presidenrepublikindonesia.

Namun gerakan yang tumbuh dari bawah tak bisa dibiarkan tercerai-berai. Akar yang kuat perlu batang dan cabang yang kokoh, dan itu hanya mungkin bila ada konsolidasi dan sekutu yang saling menopang. Konsolidasi bukan sekadar mengumpulkan kelompok yang beragam, melainkan merumuskan panduan bersama, narasi kolektif, dan visi jangka panjang yang menjaga agar energi perlawanan tidak cepat habis. Sekutu pun menjadi penting: media lokal yang merekam ingatan, komunitas yang menyediakan ruang aman, hingga jaringan solidaritas yang melampaui batas-batas wilayah. Dengan ikatan semacam ini, gerakan warga yang lahir dari keseharian bisa bertahan menghadapi tekanan, menemukan orientasi, dan bergerak lebih jauh tanpa kehilangan kejujuran asalnya.

Di titik ini, kita—seperti halnya Luffy dan para kru Topi Jerami—tahu bahwa *Pemerintahan Dunia* tidak bisa direformasi. Saat menyaksikan ketidakadilan yang menimpa Robin, dari sumber tragedi di *Ohara*, Luffy tidak berkecil hati ataupun bernegosiasi, ia justru mengepalkan tinju ke udara. “*Sogeking, shoot down that flag!*” Luffy meminta Usopp membakar bendera *Pemerintah Dunia* di *Ennies Lobby*; sebuah pernyataan untuk melawan dengan segala yang dia punya, sewujud deklarasi untuk tidak lagi tunduk pada penindasan oligarki. Dia tidak berbicara sebagai pahlawan, tapi warga yang menolak tunduk dan memilih untuk menghidupi harapan sembari berupaya untuk saling menjaga agar kita tak kehilangan nalar.



Mengibarkan bendera Topi Jerami dan melanjutkan pelayaran untuk membangun lebih banyak persekutuan guna memulihkan demokrasi barang kali adalah pilihan yang tak terhindarkan. Kurawal tidak berpretensi untuk menawarkan *panacea*, sebuah jawaban untuk semua masalah yang kita hadapi. Kami pun sering goyah. Tapi kami percaya kekuatan tidak lahir dari satu menara gading, satu platform, atau satu organisasi. Ia lahir ketika orang-orang yang belum menyerah saling menemukan dan saling menjaga. Seperti kru Topi Jerami, kita datang dari luka yang berbeda-beda. Kita selalu bisa memilih untuk berlayar bersama. Dan saat ini, jika kita mampu untuk saling bertumpu dan menjemba tangan tanpa prasangka dan curiga, itu modal yang lebih dari cukup untuk melanjutkan pelayaran.

Karena dalam dunia yang makin sinis dan melelahkan, mungkin bentuk perlawanan paling jujur hari ini adalah tetap percaya—meski agak naif—bahwa kita bisa menciptakan dunia yang lebih layak dihuni dan diwariskan. Bukan esok, bukan lima tahun lagi, tapi mulai sekarang. Dari tempat kita berdiri. Dengan orang-orang yang kita temui. Dengan tangan-tangan yang berani menggenggam, meski gemetar. Kita bisa memilih untuk tidak tenggelam sendirian, dan itu, barangkali, adalah satu-satunya bentuk kemenangan yang tersisa.

Seperti yang pernah digumamkan Luffy: *“No matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal.”*



Peserta aksi mengibarkan bendera One Piece saat demonstrasi di Mapolda Metro Jaya, 29 Agustus 2025. Aksi ini digelar sebagai respons atas insiden represif aparat terhadap masyarakat, termasuk viralnya peristiwa pengemudi ojek online dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Foto: Agoes Rudianto.



LAMPIRAN

THUNDER BERRY
LEADER YOUNG



CATATAN

"Dirty Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana publik harus menyikapinya?." *BBC News Indonesia*. 13 Februari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45g4o>

"Lonjakan Suara Misterius." *Info Aceh Timur*. 10 April 2024. <https://infoacehtimur.com/lonjakan-suara-misterius/>

"Pemilu 2024: Politik Uang dalam Pusaran Emak-Emak." *Portal Satu*. 28 Maret 2024. <https://portalsatu.com/pemilu-2024-politik-uang-dalam-pusaran-emak-emak/>

"Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto saat Pelantikan Presiden & Wakil Presiden 2024-2029." *Sekretariat Kabinet RI*. 21 Oktober 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=0-WC6xLghl>

"Ramai Diperbincangkan, Film 'Dirty Vote' Ungkap Kecurangan Menjelang Pemilu 2024." *FISIPOL UGM*. 13 Februari 2024. <https://fisipol.ugm.ac.id/ramai-diperbincangkan-film-dirty-vote-ungkap-kecurangan-menjelang-pemilu-2024/>

"Cerita ASN Cawe-cawe Pemilu 2024." *Metronewsntt.com*. 20 April 2024. <https://www.metronewsntt.com/News/page/berita/brt1713570175/32/Cerita-ASN-Cawe-Cawe-Pemilu-2024>

"Dugaan Operasi Polisi Lawan Narasi Selamatkan Demokrasi." *Klik Kaltim*. 9 Mei 2024. <https://klikkaltim.com/category/politik/dugaan-operasi-polisi-lawan-narasi-selamatkan-demokrasi>

"Investigasi mendalam para jurnalis terhadap praktik-praktik tersembunyi di tingkat akar rumput..." merujuk *Laporan Pemantauan Pemilu 2024*. AJI Indonesia, ICW, dan Themis Indonesia: Jakarta, 2024. <https://aji.or.id/data/laporan-pemantauan-pemilu-2024>

"Menelisik Dugaan Kecurangan Pemilu di Bali yang Untungkan Salah Satu Capres." *Bangsapedia.com*. 7 April 2024. <https://bangsapedia.com/posts/menelisik-dugaan-kecurangan-pemilu-di-bali-yang-untungan-salah-satu-capres>

"Pemilu 2024, Paling Menakutkan bagi Sebagian Kades." *Serat.id*. 6 April 2024. <https://serat.id/2024/04/06/pemilu-2024-paling-menakutkan-bagi-sebagian-kades/>

"pengawasan eksternal yang memaksa transparansi dalam sistem yang cenderung tertutup...." merujuk Rosales, Brizza, John Reiner Antiquerra, dan Dr. Manjesh Rana, PhD. *Melampaui Kekuasaan: Menegakkan Supremasi Hukum di Tengah Tantangan Demokrasi*. [Laporan Akhir Misi Pemantauan Pemilu oleh Ahli Internasional ANFREL (IEEOM) pada Pemilu 2024 di Indonesia]. ANFREL: Bangkok, 2024. <https://anfrel.org/2024-indonesian-general-elections-beyond-power-upholding-the-rule-of-law-amid-democratic-adversities/>

Anwar, Khaerul. "Operasi Senyap Pemenangan Prabowo-Gibran di Banten." *IDN Times Banten*. 14 April 2024. <https://banten.idntimes.com/news/banten/operasi-senyap-pemenangan-prabowo-gibran-di-banten-00-9574l-px21np>

Communication 4 Change. *Makna demokrasi dan ruang sipil di mata publik: Ringkasan temuan penelitian*. C4C: Jakarta, 2025. Unpublished.

Dalle, Darwiyat. "Dugaan Politik Uang Pilpres 2024 di Kota Parepare." *Sindosulsel.com*. 14 April 2024. <https://sindosulsel.com/dugaan-politik-uang-pilpres-2024-di-kota-parepare/>

Eggel, Dominic, Gregorie Mallard, dan March Galvin. "Do Elections Still Serve Democracy?" *Global Challenges* 16, November 2024. <https://globalchallenges.ch/issue/16/when-elections-no-longer-serve-democracy/>

Faruk, Umarul. "Titik Terang Kasus 'Pose Jari' Sejumlah PPS di Jember." *Suaranet.id*. 30 Maret 2024. <https://www.suaranet.id/2024/03/30/titik-terang-kasus-pose-jari-sejumlah-pps-di-jember/>

Firmansyah, Muhammad Akmal. "Mengkriminalkan Tim Film dan Narasumber Dirty Vote, Membungkam Masyarakat Kritis." *BandungBergerak*. 16 Februari 2024, <https://bandungbergerak.id/article/detail/159548/mengkriminalkan-tim-film-dan-narasumber-dirty-vote-membungkam-masyarakat-kritis>



https://onepiece.fandom.com/id/wiki/Bajak_Laut_Topi_Jerami. Lihat informasi *Bajak Laut Topi Jerami*.

<https://onepiece.fandom.com/id/wiki/Buggy>. Lihat informasi *Buggy*.

<https://onepiece.fandom.com/id/wiki/Kaidou>. Lihat informasi *Kaidou*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Baroque_Works. Lihat informasi *Baroque Works*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Cipher_Pol. Lihat informasi *Cipher Pol*.

<https://onepiece.fandom.com/wiki/Crocus>. Lihat informasi *Crocus*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Five_Elders. Lihat informasi *Five Elders*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Gol_D._Roger. Lihat informasi *Gol D. Roger*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Jaygarcia_Saturn. Lihat informasi *Jaygarcia Saturn*.

<https://onepiece.fandom.com/wiki/Laboon>. Lihat informasi *Laboon*.

<https://onepiece.fandom.com/wiki/Marines>. Lihat informasi *Marines*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Rob_Lucci. Lihat informasi *Rob Lucci*.

<https://onepiece.fandom.com/wiki/Sakazuki>. Lihat informasi *Sakazuki*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/Seven_Warlords_of_the_Sea. Lihat informasi *Seven Warlords of the Sea*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/World_Government. Lihat informasi *World Government*.

https://onepiece.fandom.com/wiki/World_Noble. Lihat informasi *World Noble*.

<https://youtu.be/RRgLZ66NCmE?si=4kdEjUHoWQlvP5sJ>. Lihat film *Dirty Vote*.

Hurriyah. "The Myth of Civil Society's Democratic Role: Volunteerism and Indonesian Democracy." *The Public Sphere and Political Participation* 4, No. 15, 2019. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=politik>

Huzair, Ibnu. "Menggalang Kades untuk Kandidat Tertentu." *Fajar Network*. 22 April 2024. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/22/menggalang-kades-untuk-kandidat-tertentu/>

Iqbal, Muhammad. "Bansos Beras Dadakan Jelang Pemilu." *IDN Times Banten*. 28 Maret 2024. <https://banten.idntimes.com/news/banten/bansos-beras-dadakan-jelang-pemilu-00-fx5pg-gnpsd7>

Khudori, Ahmad. "Banjir Bansos Beras Jelang Pemilu: Kriteria Penerima Bansos Tidak Jelas." *Ruangkota.com*. 12 April 2024. <https://www.ruangkota.com/nasional/244536043/banjir-bansos-beras-jelang-pemilu-kriteria-penerima-bansos-tidak-jelas>

Kilgo, Danielle K.. "Social Justice Journalism." In *The SAGE Encyclopedia of Journalism*, 2nd ed.. Edited by Gregory A. Borchard. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022. <https://doi.org/10.4135/9781544391199>

Kurawal Foundation. *Re-Energizing the Field: The Urgency for Civil Society Transformative Consolidation in the Post-Jokowi Era*. Jakarta: Kurawal Foundation, 2025.

La Palau, Emi. "Insiden Terabaikan di TPS Gegerkalong." *BandungBergerak*. 4 Mei 2024. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597339/insiden-terabaikan-di-tps-gegerkalong>

Prasetya, Eka, dan Ni Kadek Novi Febriani. "Nasib Penduduk Pendetang di Bali Saat Pemilu: Suara Dikekang Agar Tetap Satu Jalur." *Radar Buleleng*. 2 Mei 2024.



Purba, Bagas Charli Manuel. "Manifesto Aspirasi Warga Bandung 2029: Jalan Mengubah Kota Autopilot." *BandungBergerak*. 23 November 2024. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1598379/manifesto-aspirasi-wargi-bandung-2029-jalan-mengubah-kota-autopilot>

Rasdianah. "Netralitas Sekda Dibobol Kekuasaan Presiden, Putusan Bawaslu Takalar Ikut Dibobol?" *Harian News*. 8 April 2024. <https://harian.news/netralitas-sekda-dibobol-kekuasaan-presiden-putusan-bawaslu-takalar-ikut-dibobol>

Restiawan, Rizki Alfian, dan Andri Hartik. "Mengungkap Dugaan Keterlibatan Kepala Desa Saat Kampanye Pilpres di Banyuwangi." *Kompas.com*. 8 April 2024. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/04/08/110326378/mengungkap-dugaan-keterlibatan-kepala-desa-saat-kampanye-pilpres-di>

Saptohutomo, Aryo Putranto. "Isi Lengkap Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Usai Pelantikan." *Kompas.com*, 20 Oktober 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/13344741/isi-lengkap-pidato-perdana-presiden-prabowo-subianto-usai-pelantikan?page=2>

Savirani, Amalinda, et.al. *Mengakar atau Menyebarkan? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi*. Depok and Yogyakarta: ARC UI dan POLGOV UGM, 2025.

Sazli, Fauzan. "Hujan Beras di Bulan Januari." *BandungBergerak*. 20 April 2024. <https://bandungbergerak.id/article/detail/1597280/hujan-beras-di-bulan-januari>

Shodiqin. "Vonis Ringan Komisioner KPU Wonosobo, Tak Dipecat Meski Terbukti Curang Pada Pilpres 2024." *Jatengnews.id*. 25 April 2024. <https://www.jatengnews.id/2024/04/25/vonis-ringan-komisioner-kpu-wonosobo-tak-dipecat-meski-terbukti-curang-pada-pilpres-2024/>

Sura, Hengky Ola. "Kabar Burung Bansos Menjelang Pilpres di Maumere." *EkoraNTT*. 21 Maret 2024. <https://ekorantt.com/2024/03/21/kabar-burung-bansos-menjelang-pilpres-di-maumere/>

Tim Floresa. "Udin Award untuk Floresa, Dukungan Moral untuk Terus Berpihak pada Kepentingan Publik." *Floresa.co*. 8 Agustus 2023. <https://floresa.co/reportase/mendalam/55544/2023/08/08/udin-award-untuk-floresa-dukungan-moral-untuk-terus-berpihak-pada-kepentingan-publik>

Umbu, Mikael. "Fenomena Coblos Surat Suara Sisa di Kabupaten Sumba Barat Daya." *Victory News*. 3 April 2024. <https://www.victorynews.id/kupang/33112338489/fenomena-coblos-surat-suara-sisa-di-kabupaten-sumba-barat-daya>

TENTANG KURAWAL

Yayasan Kurawal merupakan lembaga filantropi untuk keadilan sosial yang bekerja untuk mendukung gagasan, inisiatif, dan upaya baru guna mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan bermaslahat di Indonesia dan kawasan *Global South*.

Kurawal berdiri dari keyakinan sederhana: demokrasi tidak bisa bertahan hanya dengan institusi, ia membutuhkan orang-orang yang bersedia menjaganya. Untuk itu, bersama mitra, kami berupaya mendorong munculnya individu dan agensi yang mempercayai, menghormati, serta menerapkan

nilai dan prinsip demokrasi bahwa kuasa mayoritas harus dibarengi perlindungan atas hak minoritas (*majority rules minority rights*) secara konsisten.

Kami percaya, tatanan demokrasi yang kuat memerlukan kehadiran lebih banyak demokrat. Oleh karena itu, jika kita mengakui bahwa para demokrat dibentuk, bukan dilahirkan, kita harus menerima bahwa dukungan warga terhadap demokrasi adalah hasil dari proses pembelajaran sosial-politik dan bukan kualitas yang hadir dengan sendirinya secara inheren dalam tiap individu.

Dalam menjalankan organisasi, Kurawal berpegang pada seperangkat nilai, antara lain:



Integritas dan Akuntabilitas

Kurawal mengutamakan prinsip keterbukaan, efektivitas, dan pertanggunggugatan dalam pengelolaan organisasi. Kurawal percaya bahwa tata kelola yang bertanggung jawab akan menumbuhkan kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kerja-kerja yang dilakukan.



Kebebasan

Untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar akuntabel dan mendengarkan aspirasi serta kekhawatiran masyarakat, Kurawal bertekad untuk tetap independen dalam menjalankan kerja-kerjanya. Hal ini memungkinkan Kurawal untuk melakukan evaluasi yang objektif dan memberikan kritik yang konstruktif tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah, mitra, dan donor. Kurawal akan tetap menjaga kebebasan dalam mengkritik atau menilai kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau kepentingan publik. Dengan cara ini, Kurawal dapat memastikan bahwa suara dan pendapat yang berbeda tetap didengar dan diperhitungkan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.



Inklusi dan Kesetaraan

Kurawal berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan inklusivitas dan kesetaraan dalam menjalankan kerja dan perannya di dalam ekosistem masyarakat sipil sebab setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi. Selain menjadi bagian penting dalam demokrasi yang sehat, komitmen ini adalah cara Kurawal mengakui dan merayakan perbedaan. Dengan begitu, Kurawal dapat belajar dari berbagai perspektif dan pengalaman, yang pada akhirnya dapat memperkaya program dan inisiatif organisasi.





CATATAN TENTANG TOKOH ONE PIECE

(Tokoh yang muncul pada cerita awal One Piece, khususnya hingga Saga Water Seven)

- ANTAGONIS -



Imu

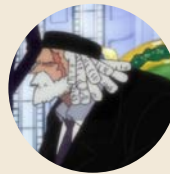
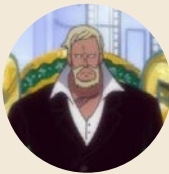
Penguasa tertinggi yang memerintah dari balik bayangan, menjaga ilusi bahwa *Pemerintah Dunia* tidak memiliki satu pemimpin, dan rela memusnahkan seluruh negeri demi mempertahankan kekuasaannya.

* Tokoh ini muncul pertama kali secara fisik di Saga Yonko, Arc Levely



Pemerintah Dunia

Organisasi global yang menguasai dunia One Piece, dikendalikan secara rahasia oleh Imu dan dijalankan secara formal oleh Gorosei. Mereka mengendalikan politik, militer, dan arus informasi untuk menciptakan kesan keadilan, padahal tujuannya semata menjaga dominasi para Bangsawan Dunia.



Gorosei (Lima Tetua)

Wajah resmi *Pemerintah Dunia* dan pelaksana kehendak Imu. Mereka memegang kendali atas sistem politik dan kebijakan global, termasuk Angkatan Laut dan Cipher Pol. Salah satunya, Jaygarcia Saturn yang bertugas memimpin bidang pertahanan dan ilmu pengetahuan tewas dibunuh Imu karena gagal menangkap kru Topi Jerami.



(Tenryubito) Bangsawan Dunia

Keturunan para pendiri *Pemerintah Dunia* yang hidup seperti dewa. Mereka kebal hukum dan memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas. *Tenryubito* adalah simbol ketidakadilan dalam sistem sosial dunia One Piece.



Angkatan Laut

Kekuatan militer utama *Pemerintah Dunia* yang menegakkan "keadilan absolut," dipimpin oleh Sakazuki Akainu yang fanatik dan tak segan mengorbankan nyawa demi stabilitas kekuasaan.



Cipher Pol

Badan intelijen rahasia *Pemerintah Dunia* yang menangani spionase dan pembunuhan, dengan unit CPO sebagai pasukan elit yang langsung tunduk pada Bangsawan Dunia. Salah satu agennya, Rob Lucci, dikenal karena kekejaman dan loyalitasnya yang tanpa kompromi terhadap *Pemerintah Dunia*.



Crocodile



Gecko Moria



Bartholomew Kuma



Dracule Mihawk



Donquixote Doflamingo



Boa Hancock



Jinbei

Sichibukai

Tujuh bajak laut kuat yang diberi status resmi oleh *Pemerintah Dunia* sebagai imbalan atas kerja sama mereka, namun sistem ini akhirnya dibubarkan karena sering disalahgunakan. Salah satu anggotanya adalah Buggy si Badut yang menonjol bukan karena kekuatan, melainkan keberuntungan dan pengaruh besar yang membuatnya sulit disentuh.



The Baroque Works

Organisasi kriminal bentukan Crocodile, yang sempat menjadi anggota *Sichibukai*, untuk merebut Kerajaan Alabasta dan senjata kuno, tapi akhirnya hancur setelah rencananya digagalkan Bajak Laut Topi Jerami.



Kaido

Pemimpin Bajak Laut Beasts dan salah satu Yonko, sebutan untuk empat bajak laut paling berbahaya dan berpengaruh yang menguasai lautan *Grand Line*. Kaido adalah penguasa tirani di Wano yang memerintah dengan teror dan memperbudak rakyatnya demi memperbesar kekuasaan dan kekuatan.

* Tokoh ini muncul pertama kali secara fisik di *Saga Dressrosa, Arc Dressrosa*



Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut seperti Roger

CATATAN TENTANG TOKOH ONE PIECE

(Tokoh yang muncul pada cerita awal *One Piece*, khususnya hingga Saga Water Seven)

- PROTAGONIS -



Gol D. Roger

Raja Bajak Laut legendaris yang menemukan rahasia dunia dan memicu "Era Bajak Laut Besar". Ia menjadi simbol kebebasan, petualangan, dan mimpi, sosok yang menginspirasi banyak bajak laut, termasuk Monkey D. Luffy, untuk menempuh jalan mereka sendiri dalam mencari harta karun *One Piece*.



Crocus dan Laboon

Crocus, mantan dokter kapal Gol D. Roger, menetap di Reverse Mountain untuk menjaga mercusuar sekaligus merawat Laboon, paus raksasa yang terus menunggu kru lamanya. Setelah lama dilanda kesepian dan menyakiti diri, Laboon kembali menemukan harapan berkat janji Luffy untuk menemuinya lagi suatu hari nanti.



Bajak Laut Topi Jerami

Bajak Laut Topi Jerami adalah kelompok bajak laut protagonis dalam serial *One Piece*. Mereka berlayar bukan hanya untuk mencari harta karun peninggalan Gol D. Roger, tapi juga menegakkan kebebasan, melawan ketidakadilan, dan menjaga mimpi setiap orang.



Monkey D. Luffy

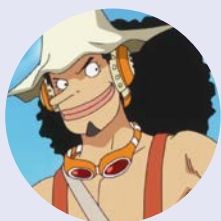
Kapten Bajak Laut Topi Jerami yang bermimpi menjadi Raja Bajak Laut. Ia berjuang demi kebebasan dan keadilan, selalu melindungi teman-temannya dengan tekad tak tergoyahkan.

**Roronoa Zoro**

Ahli pedang dan wakil kapten yang bercita-cita menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Disiplin dan loyalitasnya membuatnya jadi tulang punggung kekuatan tim.

**Nami**

Navigator jenius yang bisa membaca cuaca dan memetakan lautan berbahaya. Ia bermimpi menggambar peta dunia dan menjadi otak strategi kru di setiap perjalanan.

**Usopp**

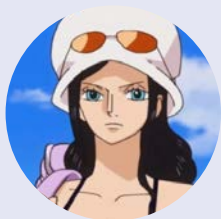
Penembak jitu sekaligus penemu kreatif yang perlahan menumbuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutannya. Ia membuktikan bahwa kecerdikan bisa menandingi kekuatan.

**Vinsmoke Sanji**

Koki kapal yang bertarung dengan kaki dan bermimpi menemukan All Blue, lautan legendaris penuh ikan dari seluruh dunia. Ia melindungi teman dan perempuan dengan penuh dedikasi.

**Tony Tony Chopper**

Dokter kapal berbentuk manusia-rusa dengan kemampuan Buah Iblis Hito Hito no Mi. Ia bercita-cita menyembuhkan segala penyakit di dunia dan menjadi simbol kebaikan serta keberanian.

**Nico Robin**

Arkeolog jenius dari Ohara dan satu-satunya yang bisa membaca Poneglyph. Pernah menjadi wakil pemimpin Baroque Works sebelum bergabung dengan Bajak Laut Topi Jerami, ia kini mencari kebenaran tentang sejarah dunia yang disembunyikan *Pemerintah Dunia*.



00076/2.1352/AU.2/11/1520-1/1/VII/2025

Laporan Auditor Independen / Independent Auditors' Report

**Dewan Pengurus dan Pengawas / Boards of Management and Supervisory
Yayasan Kurawal / Kurawal Foundation**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Kurawal ("Yayasan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Kurawal tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Yayasan Kurawal berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Yayasan Kurawal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain dengan menyatakan opini wajar atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 8 Juli 2024.

Opinion

We have audited the financial statements of Kurawal Foundation (The Foundation), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Kurawal Foundation as of December 31, 2024 and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards Without Public Accountability.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of Kurawal Foundation in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of Kurawal Foundation as of December 31, 2023 and for the year then ended, which is presented as quantitative information disclosed comparative for whole figures reported on the financial statements dated December 31, 2024 and for the year then ended, were audited by other independent auditors which stated unqualified opinion for its financial statements dated July 8, 2024.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Yayasan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Yayasan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Yayasan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing The Foundation ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate The Foundation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Association financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Yayasan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Yayasan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Yayasan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of The Foundation internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on The Foundation ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause The Foundation to cease to continue as a going concern.*



HERU SATRIA RUKMANA & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS KMK NO. 1210/KM.1/2021

The Original Report included herein is in Indonesian Language

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HERU SATRIA RUKMANA & REKAN

Heru Satria Rukmana, CPA
Ijin Akuntan Publik / License of Public Accountant No. AP. 1520

25 Juli 2025



July 25, 2025



include | protect | engage

 @KurawalFound_ID

 kurawalfoundation

 kurawalfoundationid

 Kurawal Foundation

www.kurawalfoundation.org